



Harian

JAYA POS

Perubahan Menuju Kemajuan **TERVERIFIKASI DEWAN PERS**

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E., MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

SENIN: EDISI 835 TAHUN XIX, 6 - 12 APRIL 2026

www.harianjayapos.com

HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Bupati Ciamis Buka Kegiatan Manasik Haji

Ciamis, Jaya Pos

Ratusan calon jemaah haji Kabupaten Ciamis mengikuti kegiatan manasik haji sebagai bagian dari persiapan sebelum berangkat ke tanah suci. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya, di Gedung KH Irfan Hielmy, Rabu (1/4).

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menegaskan bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang

▶▶ Halaman 5



Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya bersama ratusan calon jemaah haji yang mengikuti kegiatan manasik haji. (Foto:Mamay)

Bupati Simalungun Hadiri Grand Opening Bank BNI Cabang Tanah Jawa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Simalungun, Jaya Pos

Komitmen Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Simalungun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kembali ditegaskan melalui kehadiran langsung Bupati Simalungun H Anton Achmad Saragih pada acara Grand Opening Bank BNI Cabang Tanah Jawa, Sumatera Utara, Senin (30/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jl Sisingamanga-

▶▶ Halaman 5



Bupati Simalungun di acara Grand Opening Bank BNI Cabang Tanah Jawa

Ditengah Lonjakan Harga Minyak Dunia

SEBERAPA LAMA PEMERINTAH BISA MENAHAN KENAIKAN HARGA BBM?



Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). (ANT FOTO)

Keputusan menahan harga Pertamina-Dexlite memicu pertanyaan tentang seberapa kuat pemerintah mampu menahan beban minyak mahal dan dampaknya ke fiscal.

Jakarta, Jaya Pos

Lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah membuat berbagai negara kelimpungan. Sejumlah negara bahkan menempuh langkah ekstrem. Filipina menetapkan status darurat energi, sementara negara lain seperti Sri Lanka memperketat konsumsi melalui pembatasan bahan bakar.

Indonesia, sebagai pengimpor bersih (net importir) minyak mentah, tentu menghadapi problema serupa. Sebabnya jelas: ketergantungan terhadap impor telah membuat biaya energi domestik sangat sensitif terhadap gejolak harga global—mulai dari pembengkakan beban subsidi, hingga risiko inflasi.

Ketika berita ini ditulis, Selasa (31/3/2026), harga minyak mentah berjangka Brent naik se-

▶▶ Halaman 5

Pelepasan 300 Purna Siswa SMAN 1 Blambangan Umpu TP 2025-2026

Way Kanan, Jaya Pos

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Lampung, menggelar acara pelepasan siswa kelas XII Tahun Pelajaran (TP) 2025-2026, sekaligus penyerahan kembali kepada orang tua/wali siswa, di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab setempat, Kamis (1/3/2026).

Wisuda purna siswa tahun 2025-2026 yang bertemakan: "Raihlah Kesuksesan Dengan Mewujudkan Mimpi Menjadi Karya Nyata", dihadiri Pengawas Sekolah dari Provinsi Lampung Sugeng, kepala sekolah serta dewan guru SMAN 1 Blambangan Umpu, kepala sekolah SMP negeri, tokoh masyarakat, Uspika, Lurah Blambnagna Umpu, Komite Sekolah, perwakilan KUA dan para wisudawan serta tamu undangan.

Rangkaian acara wisuda ini di-



SMAN 1 Blambangan Umpu saat pelepasan siswa Kelas XII

meriahkan dengan berbagai acara hiburan persembahan dari sanggar tari SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Dalam kesempatan tersebut pihak sekolah juga memberi apresiasi kepada siswa-siswi berprestasi meraih nilai tertinggi, siswa berprestasi non akademik, serta yang lolos seleksi masuk perguruan

tinggi negeri maupun swasta.

Kepala SMAN 1 Blambangan Umpu Sunaryo, pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua undangan yang hadir. Dirinya juga menjelaskan, sebanyak 300 sis-

▶▶ Halaman 5

Kapolda Riau Serahkan 20 Mesin Ketinting untuk Nelayan Meranti Dorong Produktivitas dan Ekonomi Pesisir

Kepulauan Meranti, Jaya Pos

Kapolda Riau Herry Heryawan menyerahkan bantuan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan di Desa Bokor, Kecamatan Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026). Bantuan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong peningkatan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Aula Tanyta Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip. Mesin tersebut diberikan kepada 20 nelayan yang dinilai membutuhkan dukungan sarana untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas



Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan

pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga hadir sebagai pelayan dan pengayom yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga memberikan

kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujar Herry.

Ia menambahkan, masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang perlu didukung dengan fasilitas memadai agar mampu berkembang secara mandiri. Bantuan met-

▶▶ Halaman 5

Proyek Rekonstruksi Jalan Basarang-Terusan-Batanjung Telan Hampir Rp20 Miliar di Kapuas, Diduga Jadi Ajang Korupsi

Palangka Raya, Jaya Pos

Proyek Lanjutan Rekonstruksi Jalan Basarang (Desa Batuah) - Terusan - Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang menelan anggaran hampir Rp20 miliar, diduga kuat dikerjakan tidak sesuai metode dan spesifikasi teknis. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kapuas

Tahun Anggaran 2025 itu kini menjadi sorotan karena terindikasi bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 600.1.8/3562/KNTRK-BM/DAU/X/DPUPR/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Primas Mandiri dengan nilai kontrak

sebesar Rp19.608.641.000. Proyek berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas.

Meski pihak dinas telah menyatakan pekerjaan selesai 100 persen dan melakukan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO), fakta di lapangan justru menunjukkan sejumlah kejanggalan serius.

Pantauan awak media di lokasi menemukan penggunaan kayu galam untuk cerucuk siring timbunan pondasi jalan diduga tidak sesuai spesifikasi. Jika dalam dokumen teknis dipersyaratkan diameter 10-12 cm, di lapangan justru ditemukan kayu galam berdiameter sekitar 5-8 cm.

▶▶ Halaman 5



Proyek lanjutan Lanjutan Rekonstruksi Jalan Basarang (Desa Batuah) - Terusan - Batanjung, tahun 2025 menelan dana hampir Rp 20 Miliar, yang diduga dijadikan ajang korupsi.

Bapenda Ciamis Pastikan PAD dari Sektor PBB-P2 Berjalan Optimal

Ciamis, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026. Total sebanyak 1.363.814 lembar SPPT telah dicetak sejak 18 Februari 2026.

Pendistribusian dilakukan secara bertahap melalui kecamatan pada 2 hingga 4 Maret 2026. Setelah itu, dokumen pajak tersebut disalurkan ke

desa dan kelurahan untuk diteruskan kepada para wajib pajak.

Kepala Bapenda Ciamis Dr Aef Saefuloh MSi mengatakan pencetakan dan penyaluran SPPT menjadi langkah awal untuk memastikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 dapat berjalan optimal. "SPPT yang sudah dicetak jumlahnya lebih dari 1,3 juta lembar. Mulai awal Maret kami distribusikan melalui kecamatan agar segera sampai kepada wajib pajak," ujar Aef, beberapa waktu lalu.



Kepala Bapenda Ciamis Aef Saefuloh

la menjelaskan, mekanisme distribusi dilakukan berdasarkan klasifikasi ketetapan pajak. Untuk SPPT Buku I, II, dan III dengan nilai ketetapan di bawah Rp2 juta disalurkan melalui kecamatan dan desa. Sementara untuk Buku IV dan V dengan nilai di atas Rp2 juta, termasuk objek pajak menara (tower), didistribusikan langsung oleh Bapenda kepada wajib pajak.

Pada tahun 2026, Pemkab Ciamis menargetkan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 sebesar Rp25,8 miliar. Secara keseluruhan,

kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah juga ditargetkan meningkat hingga mencapai 16,15 persen.

Aef mengaku optimistis target tersebut dapat tercapai, terutama jika didukung kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu.

Untuk mempermudah pembayaran, Bapenda juga menyediakan berbagai kanal pembayaran digital. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui e-wallet, gerai ritel modern, perbankan, maupun langsung ke Bank BJB. (Mamay)

Perkuat Tata Kelola Data Sektoral Pemkab Ciamis Gelar Rapat Persiapan EPSS 2026



Rapat persiapan EPSS Tahun 2026. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang akuntabel. Langkah nyata ini direalisasikan melalui Rapat Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, di Aula Diskominfo Ciamis, Selasa (31/3).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Ciamis. Menariknya, kedua perangkat daerah inilah yang secara resmi ditunjuk sebagai lokus penilaian utama untuk tahun ini. Pemilihan lokus tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada hasil pembinaan intensif dari BPS serta rekam jejak kegiatan statistik mereka yang sudah tercatat rapi di dalam sistem Rekomendasi Statistik (Romantik).

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Ciamis Yayat Sudrajat, menggarisbawahi betapa pentingnya sinergi antara Perangkat Daerah (PD) dengan instansi pembina data agar bisa terus berjalan beriringan. "Kami telah melakukan koordinasi dan diskusi awal dengan BPS untuk menyepakati lokus penilaian tahun 2026. Penetapan DPKP dan Disnakan sebagai lokus merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan statistik di sektor ketahanan pangan dan peternakan memenuhi standar nasional," ungkap Yayat.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Ciamis Betti Yuningstih, memaparkan bahwa EPSS sejatinya adalah barometer untuk mengukur sejauhmana tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di suatu daerah. Instrumen penilaiannya cukup rigid dan komprehensif, mencakup 5 domain, 19 aspek, hingga 38 indikator yang kesemuanya menuntut ketersediaan dokumen fisik maupun digital (bukti dukung).

"Masa-masa krusial untuk penilaian ini akan bergulir mulai 1 April sampai 30 Mei 2026. Karena itu, pendampingan yang aktif dari awal proses sangat kami tekankan," jelasnya.

Mekanisme evaluasi nantinya akan berjalan secara berjenjang. Tahap awal bertumpu pada pemenuhan bukti dukung dan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) di tingkat pemda. Selanjutnya, hasil tersebut akan divalidasi oleh Tim Penilai Badan (TPB) di provinsi, sebelum akhirnya bermuara di tingkat pusat melalui Tim Penilai Pusat (TPK). Tahap akhir ini bahkan akan melibatkan tim BPS lintas daerah untuk menjaga objektivitas penilaian.

Selain membahas teknis penilaian, Tim BPS juga meluruskan pemahaman terkait perbedaan mendasar antara kegiatan administrasi rutin kedinasan dengan kegiatan statistik murni. Penguatan di lini sektoral ini menjadi sangat penting mengingat ketersediaan data pembangunan sebagian besar bersumber langsung dari dapur tiap PD, bukan semata-mata di BPS.

Agar data yang diproduksi benar-benar layak dijadikan rujukan utama dalam menyusun dokumen perencanaan daerah, setiap PD kini diinstruksikan untuk mematuhi standar Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Standar baku ini mengharuskan sebuah proses statistik melewati delapan tahapan yang terukur, yaitu Identifikasi Kebutuhan, Desain Sistem, Pembangunan Instrumen, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Analisis Data, Diseminasi Publik, hingga Evaluasi Menyeluruh.

Ke depannya, setiap lompatan di tahapan tersebut wajib diliputi dengan dokumen bukti yang valid sebagai komponen utama penilaian EPSS. Sebagai tindak lanjut dari rapat persiapan ini, seluruh PD diminta segera mengidentifikasi kegiatan statistik masing-masing melalui platform instrumen digital yang telah disediakan oleh BPS.

Melalui persiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektoral ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis menaruh harapan besar untuk dapat mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Lebih dari sekadar mengejar angka indeks, muara dari seluruh rangkaian ini adalah terciptanya basis data pembangunan daerah yang jauh lebih berkualitas, transparan, dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh elemen masyarakat Tatar Galuh Ciamis. (Mamay)

Polisi Trenggalek Berhasil Amankan Terduga Pelaku Kasus Lelang Arisan



Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki beri keterangan pers

Trenggalek, Jaya Pos

Terduga pelaku kasus penipuan dan penggelapan modus lelang arisan berhasil diamankan jajarannya Satreskrim Polres Trenggalek. Adalah NK, warga Desa Parakan, Kecamatan Trenggalek tersebut kini harus menghadapi proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, NK sempat berusaha kabur keluar negeri dan menjadi buron karena masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Itu sebagaimana disampaikan Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki dalam konferensi pers di aula Tatag Trawang Tungga, Mapolres pada Kamis 2 April 2026. "Setelah melakukan

gelar perkara, berdasarkan 2 alat bukti yang cukup serta melakukan pemanggilan namun terduga pelaku tidak hadir maka Satreskrim Polres Trenggalek menerbitkan DPO," ungkap AKBP Ridwan.

Kemudian, lanjut dia, usai petugas melakukan penyelidikan keberadaan terduga pelaku pun terdeteksi. Polres Trenggalek menggandeng Polda NTT, Polres Belu dan Kantor Imigrasi NTT untuk mengamankannya.

Hari Kamis tanggal 19 Maret 2026, NK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu dibawa ke Trenggalek. "Mendengar dilaporkan ke Polisi, NK berusaha melar-

ikan diri ke Timor Leste. Pihak Imigrasi yang mengetahui berdasarkan surat DPO kemudian melakukan deportasi untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Belu," imbuhnya.

Kapolres menerangkan, peristiwa tindak pidana berawal dari laporan sejumlah warga yang mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh tersangka.

Melalui mekanisme sistem lelang arisan dengan nilai kerugian bervariasi mulai dari 10 juta rupiah hingga 531 juta rupiah.

"Para korban ditawari lelang arisan. Namun ketika tiba waktunya mendapatkan hak, mereka tidak menerima uang arisan seperti yang dijanjikan," tandas AKBP Ridwan.

Dari tangan tersangka, lanjut dia, petugas mengamankan beberapa barang bukti. Yakni, 2 rekening bank, sebuah passport dan 2 bendel cetak rekening koran bank atas nama tersangka.

Sedangkan untuk persangkaan pasalnya, adalah pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," tegasnya.

Mantan Kasubdit Gakum Ditpolairud Polda Jatim itu turut menghimbau, kepada masyarakat yang merasa menjadi korban agar melapor-

kan diri. Termasuk memberi kesaksian untuk melengkapi seluruh berkas dan alat bukti pendukung.

Sekaligus guna mengetahui akumulasi jumlah kerugian yang ditimbulkan atas peristiwa pidana dimaksud.

"Dihimbau agar masyarakat selalu waspada dan patut mencurigai modus pelaku penipuan. Seperti, melalui tipu daya iming-iming imbalan yang besar baik melalui komunikasi langsung atau lewat media sosial. Saat mengetahui informasi apapun terkait gangguan kamtibmas, bisa menggunakan layanan bebas pulsa melalui Hotline 110," pungkas AKBP Ridwan. (Hwi)

Bupati Citra Pitriyami Optimistis Target PAD Tercapai

Pangandaran, Jaya Pos

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran sampai akhir Maret masih belum mencapai target. Hingga saat ini, kekurangannya diperkirakan sekitar Rp15 miliar.

Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, menyampaikan pemerintah daerah tetap optimistis target tersebut dapat terpenuhi seiring upaya peningkatan pendapatan dari berbagai sektor, terutama pariwisata dan pajak daerah. Menurutnya, sejumlah langkah strategis terus dilakukan, di antaranya optimalisasi retribusi wisata, peningkatan penerimaan pajak hotel dan kendaraan, serta perbaikan layanan bagi wisatawan.

Momentum libur panjang, termasuk Lebaran, juga diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pangandaran. Citra mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dengan meningkatkan kepatuhan pajak serta menjaga kualitas pelayanan, agar target PAD dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Sebelumnya, Bupati Pangandaran kembali menegaskan komitmennya dalam menata kawasan wisata Pantai Pangandaran. Dalam inspeksi men-



Bupati Pangandaran Citra Pitriyami turun tangan tertibkan pedagang dan parkir liar. (Foto:Mamay)

dadak (sidak) yang videonya viral di media sosial, Citra menegur petugas dan pengelola kawasan terkait ketidakteraturan parkir serta carut-marut pendataan pedagang di zona wisata tersebut.

Dalam video yang beredar, Citra terlihat mendatangi langsung lokasi parkir yang semestinya steril dari kendaraan roda empat.

Ia mempertanyakan pihak yang memberi izin parkir di zona terlarang serta meminta penjelasan dari petu-

gas di lapangan. "Saya ingin tahu siapa yang memberi izin. Ini harusnya steril," ujar Citra kepada petugas saat sidak berlangsung.

Selain persoalan parkir liar, Citra menyoroti lemahnya penguasaan data oleh petugas terkait aktivitas di wilayah tugas masing-masing. Ia menegaskan bahwa setiap petugas wajib mengetahui secara detail jumlah pedagang asongan, pengelola wahana seperti ATV, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan di

zona tersebut. "Siapa yang bertugas, siapa yang mengamankan, teman-teman harus tahu. Jumlah pedagang asongan berapa, pemilik ATV siapa saja, harus paham," tegasnya.

Menurut Citra, lemahnya koordinasi dan minimnya penguasaan data menjadi salah satu penyebab utama kesemrawutan yang kerap dikeluhkan wisatawan, terutama saat musim liburan. Ia juga memberikan peringatan keras kepada pengelola dan petugas yang dinilai tidak bekerja maksimal. "Saya tidak akan segan melakukan evaluasi hingga pemutusan kerja sama apabila tidak ada perubahan. Saya tidak suka kerja yang hanya gugur kewajiban. Kalau diajak bicara tetap begitu-begitu saja, ya sudah (putus perjangiannya)," ujarnya.

Langkah penertiban ini disebut sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pariwisata di Pangandaran. Pemerintah daerah menargetkan kawasan Pantai Pangandaran lebih tertib, nyaman, dan memiliki standar pengelolaan yang lebih profesional.

Pasca-sidak, sejumlah area yang sebelumnya dipenuhi parkir liar mulai terlihat lebih tertata. Namun, konsistensi pengawasan dan evaluasi berkala disebut menjadi kunci keberlanjutan penataan kawasan tersebut. (Mamay)

Rumuskan Solusi Berbagai Persoalan Naker di Daerah Disnaker Ciamis Gelar FGD



Disnaker Kabupaten Ciamis gelar FGD bersama Bapperinda. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ciamis menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu strategis di bidang ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPTD Tenaga Kerja, Jl Bojonghuni Kelurahan Maleber, beberapa waktu lalu.

Kepala Disnaker Ciamis Dase Fadli Yusdy Mubarak SH MPd mengatakan, forum diskusi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta organisasi pekerja sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. "Forum ini menjadi ruang diskusi bersama untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis, mulai dari penempatan tenaga kerja, pelatihan hingga perlindungan tenaga kerja," ujarnya.

FGD tersebut diikuti berbagai unsur perangkat daerah dan lembaga terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan unsur media.

Kemudian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. Selain itu, hadir pula unsur pemerintah kecamatan, bagian perekonomian dan organisasi di lingkungan Setda, serta perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Ciamis.

Dase menambahkan, melalui forum tersebut diharapkan muncul berbagai masukan dari para peserta yang dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terbangun kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi pekerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Ciamis. (Mamay)

Pentingnya Komitmen Bersama Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah



Dalam upaya memperkuat tata kelola pariwisata yang berdaya saing dan partisipatif, Dispar Kabupaten Ciamis menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik di Aula Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Dalam upaya memperkuat tata kelola pariwisata yang berdaya saing dan partisipatif, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Ciamis menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik di Aula Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Acara ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program kerja melalui semangat Collaborative Governance.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan 13 perangkat daerah mitra kerja, 9 kecamatan, pimpinan perhotelan, berbagai kelompok masyarakat, perhimpunan kepariwisataan, serta para pelaku usaha di Kabupaten Ciamis.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan rencana kerja yang akurat, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik sesuai amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Dian Kusdiana, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan perencanaan partisipatif untuk menyinkronkan prioritas antar perangkat daerah. "Tujuan utama kami adalah menyelaraskan program kegiatan antar-perangkat daerah agar tercipta efektivitas pencapaian sasaran sesuai kewenangan," ujar Dian.

Forum ini juga menghadirkan narasumber akademisi, yakni Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Nurdiana Mulyatini, serta Wakil Dekan 3 FISIP Asep Nurwandana, guna memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Heryan Ruswandi, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mendukung sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Merujuk pada Perencanaan Strategis (Renstra) 2025-2029, Dispar Ciamis menetapkan dua indikator kinerja utama, yaitu Peningkatan jumlah pertumbuhan wisatawan serta Peningkatan jumlah investasi pada sektor pariwisata.

Heryan mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk terbuka dalam memberikan gagasan konstruktif. Ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa bersifat otonom atau berdiri sendiri, melainkan harus berbasis kolaborasi (Collaborative Government). (Mamay)

Disbudpora Ciamis Permudah Warga Lapor Keluhan Lewat Aplikasi SP4N-LAPOR

Ciamis, Jaya Pos

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis mengajak seluruh elemen warga Tatar Galuh untuk lebih berani bersuara melalui platform pengaduan digital SP4N-LAPOR!.

Langkah strategis ini diambil guna menjamin setiap aspirasi dan keluhan masyarakat tertangani secara cepat dan profesional.

Optimalisasi kanal pengaduan publik ini bukanlah sekadar formalitas birokrasi semata. Di era yang serba digital ini, kehadiran platform terpadu diharapkan mampu memangkas jarak antara perangkat daerah dan masyarakat luas hanya dalam satu genggam smartphone.

Sekretaris Disbudpora Ciamis Hendri Ridwansyah ST MM menegaskan bahwa partisipasi aktif publik melalui kanal resmi menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja instansinya. "Warga kini tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor dinas hanya untuk menyampaikan keluhan atau saran membangun," tegasnya.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Tatar Galuh. "Melalui sistem terpadu ini, setiap keluhan terkait kondisi fasilitas olahraga, program pembinaan pemuda yang mandek, hingga urusan pelestarian situs adat dan budaya dipastikan tidak akan mengendap begitu saja. Kami sangat terbuka terhadap masukan masyarakat. Melalui sistem SP4N-LAPOR!,



Disbudpora Ciamis meluncurkan gebrakan baru di awal tahun 2026. (Foto:Mamay)

kami menjamin setiap aduan terkait layanan Disbudpora Ciamis dikelola secara aman, terstruktur dan transparan," ujar Hendri saat memberikan keterangan resmi di hadapan awak media, Rabu (1/4).

Dijelaskannya, penggunaan platform SP4N-LAPOR! ini tidak hanya bersifat lokal di tingkat kabupaten. Integrasinya dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) membawa tiga keuntungan besar bagi kemajuan warga Ciamis diantaranya setiap laporan yang masuk tidak hanya masuk ke meja dinas daerah, tetapi turut dipantau langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini memastikan akuntabilitas dan kecepatan respons perangkat daerah tetap terjaga

secara ketat. Warga Ciamis tidak perlu ragu atau takut untuk memberikan kritik konstruktif. Identitas pelapor dilindungi sepenuhnya oleh sistem keamanan enkripsi pada aplikasi tersebut. "Aspirasi yang valid akan langsung diturunkan kepada bidang terkait di Disbudpora Ciamis untuk segera dicarikan solusi nyata di lapangan, lengkap dengan tenggat waktu penyelesaian," jelas Hendri.

Diungkapkan Hendri, banyak warga yang mungkin masih bingung jenis laporan seperti apa yang bisa diadukan. Diantaranya contoh ranah kerja dinas yang bisa dilaporkan dalam bidang Sektor Olahraga meliputi kerusakan fasilitas di Stadion Galuh, kurangnya perawatan GOR

daerah, atau minimnya dukungan untuk atlet lokal Ciamis yang akan berlaga di tingkat provinsi. Sektor Kepemudaan meliputi usulan program pemberdayaan Karang Taruna, permohonan pelatihan kewirausahaan pemuda, atau pelaporan program kepemudaan desa yang tidak berjalan maksimal.

Sektor Kebudayaan meliputi informasi mengenai temuan benda bersejarah, usulan pelestarian kesenian lokal (seperti Bebegig atau Ronggeng) yang mulai punah, hingga masalah perawatan situs cagar budaya di kecamatan masing-masing.

"Bagi masyarakat yang menemukan kendala di lapangan atau memiliki ide inovatif untuk kemajuan Ciamis,

proses pelaporan kini sangat mudah diakses. Buka browser di HP Anda dan kunjungi situs resmi lapor.go.id, atau unduh aplikasi SP4N-LAPOR! di Google Play Store/App Store. Lakukan registrasi singkat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat email aktif. Tuliskan keluhan atau saran Anda secara jelas. Sertakan detail lokasi di Ciamis, waktu kejadian, dan unggah foto/video sebagai bukti pendukung. Pilih instansi tujuan pelaporan (Ketik: Pemerintah Kabupaten Ciamis/Disbudpora). Tekan tombol

Masyarakat jangan ragu untuk melapor, tandas Hendri, dialog dua arah adalah kunci pelayanan prima. (Mamay)

Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

Bupati Sampaikan Capaian Indikator Makro Pembangunan 2025

Sukabumi, Jaya Pos

DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Reses Ke-1 Tahun 2026, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk penyusunan RKPd 2027, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Sukabumi, Selasa (31/3/2026).

Bupati Sukabumi H Asep Japar hadir langsung dalam paripurna tersebut bersama Wakil Bupati H Andreas, Sekda H Ade Suryaman, jajaran Forkopimda, Forkopimcam, dan para undangan.

Dalam kesempatan itu, Bupati H Asep Japar memaparkan secara rinci capaian indikator makro pembangunan yang menjadi ukuran keberhasilan kolektif



Bupati dan Wabup bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sepanjang 2025.

Capaian tersebut meliputi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pengendalian demografi serta evaluasi pembangunan dan catatan strategis.

Menurut bupati, sejumlah

keberhasilan tersebut tidak lepas dari pengelolaan keuangan daerah yang dinilai lebih tepat sasaran. Pada 2025, Pemkab Sukabumi berhasil menjaga ritme fiskal dengan baik, ditunjukkan melalui realisasi APBD yang mencakup pendapatan dan belanja daerah secara proporsional.

Bupati juga menyoroti realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi motor penggerak pembangunan. IKU tersebut mencakup sektor sosial, kesehatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, investasi, ketahanan pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan.

"Mayoritas indikator menunjukkan performa yang melampaui target, meski beberapa indikator seperti infrastruktur jalan masih membutuhkan penyempurnaan," ujar bupati.

Untuk indikator yang belum tercapai utamanya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah korektif dan penyesuaian strategi pada tahun anggaran berjalan.

Bupati menegaskan bahwa capaian pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan

DPRD.

"Dengan dukungan pengawasan serta anggaran dari rekan-rekan legislatif, berbagai tantangan dapat diselesaikan secara bertahap," ungkapnya.

Beliau juga menekankan bahwa setiap capaian masih menyisakan ruang untuk peningkatan. Karena itu, ia berharap DPRD memberikan catatan strategis dan rekomendasi untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun mendatang.

Menutup paparannya, bupati berharap capaian pembangunan tahun 2025 dapat menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan ke depan.

Di sela-sela kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan DPRD. (YUD)

Bupati Mas Rusdi Lantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Pasuruan

Pasuruan, Jaya Pos

Dalam upaya memperkuat jalannya pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan. Pelantikan digelar di Auditorium Mpu Sindok, Gedung Bupati Pasuruan, dan dihadiri oleh para pejabat serta unsur pimpinan daerah, pada Rabu (1/4/2026).

Adapun pejabat yang dilantik Fathurrahman sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yuswianto menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Sarinah Rostief sebagai Kepala Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

dan Firdaus Handara menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi Sutejo menjelaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian jabatan. Menurutnya, rotasi dan promosi pejabat adalah bagian dari siklus organisasi yang penting untuk menjaga agar roda pemerintahan terus berjalan dengan baik.

Bupati juga menegaskan bahwa karier ASN di Kabupaten Pasuruan tidak lagi ditentukan oleh senioritas, kedekatan personal, atau faktor titipan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemkab Pasuruan kini menerapkan sistem merit berbasis manajemen talenta. Artinya, siapa yang berprestasi dan punya kemampuan, itulah yang



Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutedjo lantik Fathurrahman sebagai Kepala BKPSDM, Yuswianto sebagai Kepala BPKAD, Sarinah Rostief sebagai Kepala SDA dan Firdaus Handara sebagai Kepala Diskominfo

akan mendapat kesempatan. Penerapan sistem ini juga sudah mendapat lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 853 Tahun 2025 tentang persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Ka-

bupaten Pasuruan. Dengan sistem ini, Bupati Rusdi berharap bisa lebih cepat dan tepat dalam memilih ASN yang paling sesuai untuk mengisi sebuah jabatan.

Dalam pelantikan tersebut Bupati Rusdi juga berpesan kepada pejabat yang dilantik yakni ASN harus

siap menghadapi era digital, menguasai perangkat digital, memahami keamanan siber, serta memanfaatkan pembelajaran daring akan menjadi dasar yang kuat. Selain itu juga membangun jaringan kerja yang luas dan punya semangat inovatif serta mandiri.

Dengan dilantiknnya para pejabat baru ini, Bupati Rusdi Sutejo berharap program-program prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan bisa semakin cepat terlaksana. Para pejabat diminta segera bergerak dan tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan tanggung jawab baru yang diemban. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju birokrasi Kabupaten Pasuruan yang lebih profesional, terbuka, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. (Wio)

Julita Damanik Hadir di Tengah Warga, Pastikan Bumil dan Balita Mendapat Pelayanan Terbaik

Simalungun, Jaya pos

Suasana hangat dan penuh kepedulian terlihat di Posyandu Dahlia, Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, saat Julita Damanik hadir langsung di tengah warga untuk memastikan pelayanan kesehatan ibu hamil (bumil) dan balita berjalan dengan baik pada 30 Maret 2026. Di tengah hangatnya kebersamaan warga, Julita Damanik hadir langsung untuk memastikan setiap ibu hamil dan balita memperoleh pelayanan ke-

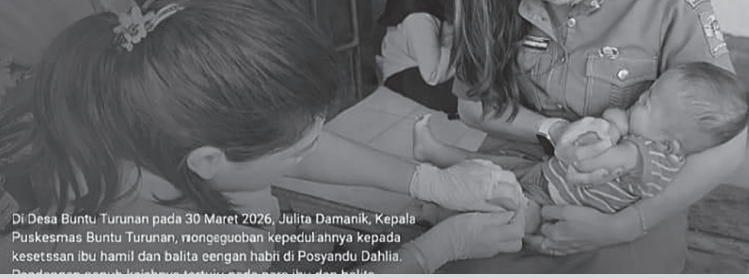
sehatan terbaik.

Kehadiran Julita Damanik bukan sekadar menjalankan tugas sebagai Kepala Puskesmas, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan perhatian kepada masyarakat. Ia menyapa para ibu satu per satu, berdialog dengan warga, serta memastikan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi berjalan dengan baik.

Bagi para bumil, kehadiran pelayanan ini memberikan rasa tenang karena kondisi kesehatan mereka dan janin dapat dipantau secara langsung. Sementara bagi

Menyapa Ibu Hamil dan Balita di Desa Buntu Turunan

Kepala Puskesmas Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.



Di Desa Buntu Turunan pada 30 Maret 2026, Julita Damanik, Kepala Puskesmas Buntu Turunan, meneguhkan kepeduliannya kepada kesetiaan ibu hamil dan balita dengan nabli di Posyandu Dahlia. (Dokumentasi: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Simalungun)

para balita, imunisasi yang diberikan menjadi langkah penting untuk menjaga tumbuh kembang dan melindungi mereka dari berbagai penyakit sejak usia dini.

Di Posyandu Dahlia, para bumil menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan tekanan darah hingga pemantauan kondisi kehamilan. Sementara itu, anak-anak balita mendapatkan imunisasi dan pemeriksaan tumbuh kembang agar kesehatan mereka tetap terjaga sejak dini.

Didampingi Bidan Desa Dewi Erpina Sianturi serta kader posyandu, Julita Damanik menyapa warga satu per satu dan mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan sejak dini merupakan langkah penting untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas.

Warga menyambut baik kehadiran Kepala Puskesmas dan berharap pelayanan seperti ini terus dilakukan secara rutin di Desa Buntu Turunan. (RD)

Kejari Belitung Usut Dugaan Korupsi Dermaga Pulau Kuil Rp4 Miliar, Kondisi Rusak Disorot



Mantan anggota DPRD Belitung, Johan Hanibal Palit

Belitung, Jaya Pos

Mantan anggota DPRD Belitung, Johan Hanibal Palit, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung yang mengusut dugaan korupsi proyek rehabilitasi Dermaga Nelayan Pulau Kuil, Desa Gersik, Kecamatan Selat Nasik.

Ia menegaskan, jika terbukti terjadi pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat harus diproses hukum hingga ke pengadilan.

Menurut Johan, praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) masih sulit diberantas, termasuk di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kasus ini mencuat setelah proyek dermaga senilai Rp4,045 miliar dari APBD Belitung Tahun Anggaran 2022 dilaporkan mengalami kerusakan parah dan diduga gagal konstruksi.

Penyelidikan ditangani Kejari Belitung di bawah Kejari Teuku Panca Adhyaputra, sebagai kelanjutan dari proses yang telah dimulai pada masa Kejari sebelumnya, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro. Informasi yang beredar, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan.

Sejumlah pihak terkait proyek, mulai dari PPK, KPA, tim pemeriksa, panitia lelang, perencana hingga kontraktor, berpotensi dimintai keterangan. Namun, Kejaksaan belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyidikan.

Berdasarkan pantauan dan laporan warga, kondisi dermaga dinilai tidak layak. Sejumlah tiang pancang terlihat miring, bahkan sebagian konstruksi dilaporkan tenggelam saat musim angin barat.

Hal ini memicu dugaan adanya kegagalan konstruksi, yang kemungkinan disebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Johan meminta proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan.

"Yang penting prosesnya tuntas, sehingga jelas apakah ada pelanggaran hukum atau tidak," ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan kesalahan metode pemasangan tiang pancang. Menurutnya, penggunaan alat yang tidak sesuai dapat memengaruhi kekuatan struktur.

"Kalau tidak sesuai spesifikasi, tiang bisa mudah bergeser dan cepat rusak," katanya.

Johan menegaskan, jika ditemukan indikasi gratifikasi atau fee proyek, aparat penegak hukum harus bertindak tegas.

Kerusakan dermaga turut dikeluhkan nelayan setempat. Mereka mengaku aktivitas terganggu, terutama saat musim angin barat. "Kalau angin barat, dermaga sering tenggelam. Kalau angin timur masih bisa dipakai," ujar salah satu warga. Padahal, dermaga tersebut diharapkan menjadi fasilitas penting untuk tambak labuh dan bongkar muat hasil tangkapan.

Pemdes Mengaku Tak Dilibatkan

Kepala Desa Gersik, Mahram, mengaku tidak pernah mendapat informasi resmi terkait pembangunan dermaga tersebut.

"Tidak ada pemberitahuan, padahal ini menyangkut kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia juga menilai kondisi tiang pancang sudah miring dan diduga tidak tertanam optimal. Pihak desa siap memberikan keterangan jika dibutuhkan penyidik.

Berdasarkan data LPSE, proyek rehabilitasi Dermaga Pulau Kuil dilelang pada 2022 dengan nilai Rp4,045 miliar dan dimenangkan CV Bangkit Jaya.

Saat itu, jabatan PPK dipegang pejabat Dishub berinisial F, sementara KPA dijabat Ub dan kemudian dilanjutkan HC.

Hingga kini, pihak terkait termasuk kontraktor belum memberikan keterangan resmi.

Kasus ini memicu desakan publik agar Kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi tanpa tebang pilih.

Jika terbukti, kasus ini dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah daerah melalui BKPSDM menyatakan siap menindaklanjuti jika ada aparat yang terlibat proses hukum. Sementara Inspektoral mengaku terus berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam upaya pencegahan korupsi.

Sejumlah pejabat dikabarkan telah menjalani pemeriksaan. Masyarakat berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memberi efek jera. (Yustami)

Lakukan Pembinaan UP2K di Nagori Karang Anyar Langkah Nyata Meningkatkan Pendapatan Desa

Simalungun, Jaya Pos

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun melakukan kegiatan pembinaan terhadap Desa Percontohan dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Nagori Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Provinsi Sumatera Utara, Senin (30/3/2016).

Kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan absolut dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat tersebut dipimpin Staf Ahli II PKK Ny Yulince Mixnon Andreas Simamora mewakili Ketua TP PKK, serta sejumlah pengurus PKK lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Pangulu Nagori Karang Anyar Safii, menyampaikan sambutan hangat kepada seluruh rombongan yang hadir. Ia menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permintaan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan.

Menurut Safii, pihak nagori terus berupaya menjalin sinergi antara program PKK dengan aktivitas masyarakat agar dapat memberikan manfaat nyata sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam arahnya Staf Ahli PKK Ny Yulince Mixnon Andreas Simamora menjelaskan bahwa UP2K



Pembinaan UP2K di Nagori Karang Anyar

merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah.

"UP2K bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi merupakan langkah nyata dalam meningkatkan pendapatan warga, menciptakan kemandirian perempuan, serta meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing," jelas Ny Yulince.

Ny Yulince juga mem-

berikan apresiasi kepada kader-kader PKK Nagori Karang Anyar yang menunjukkan konsistensi dalam mengelola berbagai produk kreatif, mulai dari olahan pangan hingga kerajinan tangan.

Menurutnya, tujuan dari pembinaan ini adalah agar kualitas produk UP2K semakin baik, memenuhi standar yang ditetapkan, dan mampu memperluas jaringan pemasaran.

Ny Yulince juga menekankan

pentingnya kerja sama yang erat antara TP PKK, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten agar program ini dapat berjalan dengan optimal.

"Semangat kewirausahaan ibu-ibu harus terus tumbuh demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mari kita melangkah dengan optimis dan penuh ke kompakkan," pungkasnya.

Materi pembinaan dalam kegiatan ini disampaikan oleh Ny Eva Suryati Ulyarta sebagai Ketua Bidang II dan Ny Lurinin Purba sebagai Ketua Bidang I TP PKK Kabupaten Simalungun.

Selain para pengurus TP PKK kabupaten, kegiatan juga dihadiri oleh perangkat daerah terkait, Camat Gunung Maligas Masra, serta pengurus TP PKK dari berbagai nagori se-Kecamatan Gunung Maligas. (RD)

LKPJ Bupati Tanjabbar 2025 Resmi Diserahkan, DPRD Segera Lakukan Evaluasi

Kualatungkal, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menggelar Rapat Paripurna Pertama dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/26).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, SE. Agenda ini menjadi tonggak penting dalam fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran ke belakang.

Dalam pembukaannya, Hamdani menegaskan bahwa rapat ini merupakan



Ketua DPRD (kanan) saat Pimpin Paripurna Pertama Tahun 2026

amanat konstitusi yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2019. Ia mengapresiasi kehadiran seluruh unsur FORKOPIMDA dan jajaran

pejabat pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen sinergi antar lembaga.

Penyampaian LKPJ ini dilakukan tepat waktu, meng-

ingat batas akhir penyampaian adalah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hamdani menjelaskan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat resmi dari Bupati per tanggal 27 Maret 2026 sebelum akhirnya dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus).

Ketua DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam laporan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi anggota dewan.

Langkah Selanjutnya: Rekomendasi DPRD Penyerahan dokumen LKPJ dari Bupati kepada Pimpinan DPRD menandai dimulainya fase pembahasan internal di tingkat komisi maupun panitia khusus (Pansus). Hasil dari evaluasi ini nantinya akan melahirkan

rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun berjalan.

Bupati Tanjabbar yang diwakili oleh Sekda Herman-syah naik ke podium untuk membacakan nota pengantar yang merangkum capaian kinerja, realisasi anggaran, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Rapat Paripurna pertama Penyampaian Nota pengantar LKPJ Bupati TA. 2025 ini berlangsung dengan lancar dan khidmat.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Tanjabbar, Unsur Forkopimda, para OPD, Sekretaris, Kabag, Kabinet beserta Staf lingkup Tanjabbar. (Tenk/ Kominfo- Tjb)

Kesbangpol: Selaraskan Anggaran Personil Paskibraka Mukomuko Terancam Pengurangan

Mukomuko, Jaya Pos

Seleksi penerimaan calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) untuk persiapan peringatan hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 mendatang pemerintah Kabupaten Mukomuko dibawah naungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku lending sektor kegiatan telah menyelenggarakan seleksi penerimaan sejak beberapa hari belakangan.

Tahapan demi tahapan seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka berjalan sebagaimana mestinya namun untuk kuota peserta dikabar-

kan akan terjadi penciptaan personil yang notabeneanya, selaraskan dengan persiapan anggaran daerah namun rencana pengurangan itu menunggu petunjuk dari kepala daerah, kata Kepala Badan KesbangPol Mukomuko Muhammad Harbi SH. saat di wawancara Kamis, 2 April 2026 di ruang kerjanya.

"Melihat kondisi persiapan anggaran daerah yang ada kita berencana akan melakukan pengurangan kuota pesonil Paskibra sebelumnya dari 36 orang pasukan menjadi 25 hingga 28 orang," ungkap Kaban Kesbangpol.



Situasi Paskibra di depan Kantor Kesbangpol Mukomuko

Ia juga mengungkapkan, meski pengurangan ini sudah

kita rencanakan namun kita tetap berkoordinasi dengan kepala

daerah atau petunjuk dari kepala daerah," demikian Harbi.

"Kunun kabarnya pengurangan anggota pasukan bukan kita saja namun provinsi juga melakukan pengurangan sementara kita mengacu pada ketersediaan anggaran sekiranya tidak bisa menghendel dengan jumlah seperti biasanya dengan berat hati pengurangan mau tidak mau dijalankan," ujar nya.

Ia menegaskan, "sembari menunggu petunjuk kepala daerah latihan dan pembinaan akan terus berjalan sebagai mana mestinya," imbuhnya. (Jpr)

Proyek Rekonstruksi Jalan Basarang–Terusan–Batanjung Halaman 1

Perbedaan ini berpotensi memengaruhi daya dukung konstruksi, terutama pada kondisi tanah rawa yang memerlukan penguatan maksimal.

Tak hanya itu, item penyediaan badan jalan juga diduga tidak dikerjakan sesuai standar. Pemeriksaan badan jalan terlihat tidak rata, tidak bersih, dan tidak dipadatkan secara optimal. Akibatnya, geotextile separator yang dipasang di atasnya tampak mengerucut, bergelombang, bahkan di beberapa titik tidak dijahit sebagaimana mestinya.

Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas struktur perkerasan dan mempercepat kerusakan jalan.

Pada lapisan pondasi agregat, ditemukan indikasi mutu dan volume material yang tidak sesuai ketentuan. Komposisi abu batu dinilai kurang,

ketebalan lapisan tampak tipis, serta pemadatan tidak maksimal. Dampaknya, ketika hujan turun, permukaan agregat mudah mengalami distorsi dan membentuk cekungan yang digenangi air.

Lebih memprihatinkan lagi, lapisan aspal pada ruas sepanjang kurang lebih 6.000 meter dengan lebar 6 meter diduga tidak memenuhi standar mutu. Permukaan aspal terlihat kasar, berpori, dan tidak homogen. Kondisi ini diduga akibat penghamparan dilakukan pada suhu yang tidak sesuai spesifikasi serta pemadatan yang tidak optimal.

Ironisnya, meski proyek baru selesai dikerjakan, sudah terlihat sejumlah titik tambal sulam (patching), yang mengindikasikan kerusakan dini pada struktur jalan.

Dalam pelaksanaan

proyek ini juga ditemukan dugaan bahwa beberapa item pekerjaan tidak dikerjakan, antara lain pembangunan direksi keet dan bahu jalan. Selain itu, papan nama proyek dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, karena tidak mencantumkan waktu pelaksanaan, tanggal mulai, dan tanggal selesai pekerjaan.

Minimnya transparansi dan dugaan lemahnya pengawasan memunculkan pertanyaan publik terkait proses pengendalian mutu serta fungsi pengawasan internal proyek.

Terkait berbagai temuan tersebut, Jaya Pos Perwakilan Kalimantan Tengah telah melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR

Kabupaten Kapuas melalui surat Nomor: 068/HJP-KT/III/2026 tertanggal 6 Maret 2026. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan segera turun tangan untuk melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh. Pasalnya, proyek infrastruktur bernilai hampir Rp20 miliar yang bersumber dari dana publik seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, maka bukan hanya kualitas jalan yang dipertanyakan, tetapi juga integritas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kapuas.

(Mandau)

Kapolda Riau Serahkan 20 Mesin Ketinting Halaman 1

sin ketinting ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi lokal.

“Kita ingin masyarakat pesisir terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” lanjutnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jambu

madu dan mangga sebagai bagian dari implementasi konsep Green Policing. Langkah ini menjadi simbol bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Camat Rangsang Barat, Jefri, mengapresiasi perhatian Kapolda Riau terhadap masyarakat pesisir. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu nelayan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil

tangkapan mereka.

“Bantuan ini sangat bermanfaat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Senada disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Farogi. Ia menilai bantuan tersebut tepat sasaran dan berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi an-

tara Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta memastikan program-program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan ini juga mendapat sambutan antusias dari warga setempat dan berlangsung dalam suasana aman serta kondusif.

(AH)

Ditengah Lonjakan Harga Minyak Dunia Halaman 1

kitar 2 persen menjadi 114,98 dolar AS per barel, sementara Minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) menguat 1,8 persen ke harga 104,73 per barel. Jika ditarik dalam rentang tempo sebulan, dua harga referensi minyak di pasar global tersebut masing-masing telah melonjak 59 persen dan 56 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Namun, di tengah tekanan itu, pemerintah justru mengambil langkah yang tak biasa: menahan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, yang lazimnya mengikuti mekanisme pasar. Kebijakan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya kepada media sekitar pukul 14.00 Wib.

Menurut Prasetyo, keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi antara pemerintah, Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) atas arahan Presiden. Maklumat tersebut sekaligus memberikan kepastian informasi di tengah simpang siur kabar kenaikan harga BBM di media sosial, yang dipicu oleh beredarnya dokumen berstempel “confidential” terkait proyeksi harga jual eceran (HJE) BBM non-subsidi Pertamina untuk April 2026—mulai dari Pertamina yang disebut mencapai Rp17.850 per liter hingga Dextlite Rp23.650 per liter.

Pertanyaannya: sampai seberapa lama pemerintah—dan Pertamina—mampu menahan beban selisih antara harga keekonomian BBM dengan harga jual yang ditetapkan ke masyarakat?

Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong, melihat kemampuan tersebut sebenarnya terbatas. Jika mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menembus 50 persen, harga Pertamina secara teoritis bisa terdorong hingga Rp15.350 per liter. Perhitungan ini mengacu pada asumsi bahwa komponen minyak mentah menyumbang sekitar 40 persen dari harga BBM.

Asumsi tersebut tak jauh berbeda dengan tangkapan layar dokumen “confidential” yang sempat beredar. Dalam dokumen itu, harga dasar Pertamina diperkirakan melonjak dari sekitar Rp10.603 menjadi Rp15.388 per liter. Setelah ditambah PPN 11 persen dan PBBKB, harga jualnya diproyeksikan naik dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter—selisih kenaikan mencapai sekitar Rp5.550.

Sebagai catatan, dalam dokumen yang beredar, proyeksi harga BBM non-subsidi ini disusun dengan mempertim-

bangkan sejumlah variabel utama—mulai dari lonjakan harga minyak mentah global, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga komponen pajak seperti PPN dan PBBKB—yang seluruhnya berkontribusi pada pembentukan harga akhir di tingkat konsumen.

Meski demikian, dalam skenario yang lebih realistis, Lukman memperkirakan harga Pertamina seharusnya berada di kisaran Rp13.500-Rp14.500 per liter.

“Idealnya Pertamina di Rp13.500-14.500. Tapi kalau murni mengikuti harga minyak yang sudah naik 50 persen, dengan asumsi komponen minyak 40 persen, kenaikannya bisa 25 persen, atau sekitar Rp15.350,” ujarnya kepada wartawan.

Pandangan serupa datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia memproyeksikan kenaikan BBM non-subsidi akan lebih moderat, di kisaran 10-15 persen. Namun, kompensasinya kemungkinan berupa pengetatan distribusi BBM subsidi—terutama solar dan RON 90.

“Artinya pemerintah menghabiskan opsi lain. Tekanan harga minyak membuat kebutuhan subsidi energi bengkak Rp126-130 triliun, sementara belum ada pembahasan realokasi dalam APBN Perubahan 2026,” kata Bhima dilansir dari Tirta.

Efek Rambatan

Persoalannya, pengetatan BBM subsidi berisiko mendorong sebagian masyarakat jatuh ke bawah garis kemiskinan—terutama mereka yang berada di kelompok rentan: tidak miskin, tetapi juga belum aman secara ekonomi. Kelompok yang jumlahnya besar ini sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, baik dari harga BBM, ongkos transportasi, maupun pangan.

Hal ini tak lepas dari ukuran kemiskinan di Indonesia yang masih sangat rendah, sehingga banyak orang tidak tercatat miskin, padahal kondisi ekonominya masih pas-pasan. Sebagai gambaran, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun tipis dibanding Maret. Namun, garis kemiskinan justru naik 5,30 persen, terutama dipicu oleh harga makanan yang menyumbang 74,67 persen dalam perhitungannya.

Artinya, ukuran kemiskinan di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan memenuhi kebutu-

han makan. Di atas itu, banyak rumah tangga sebenarnya masih hidup dengan ruang keuangan yang sempit.

“Memang ada kelas menengah yang pakai BBM subsidi, tapi faktanya 142 juta penduduk berada di kelompok rentan. Kelas menengah juga turun sekitar 1 juta orang pada 2025,” ujar Bhima.

Pemerintah sendiri belum bisa memberikan kepastian sampai kapan harga BBM non-subsidi dapat ditahan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya kepada media dari Jepang pada Senin (30/3/2026), hanya mengungkap soal pertimbangan pemerintah untuk segera merevisi harga BBM untuk industri seperti RON 95 dan 98.

Itu pun, menurut Bhima, berisiko mendorong biaya produksi sektor industri, yang pada gilirannya akan mengalihkan beban ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang. “Padahal konsumen belum siap menghadapi kenaikan harga barang,” kata Bhima.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Bhima, pelaku usaha juga berpotensi menahan ekspansi, bahkan melakukan efisiensi hingga downsizing atau yakni menyesuaikan skala produksi dengan kenaikan biaya.

Ujungnya, kombinasi kenaikan BBM non-subsidi dan pembatasan BBM subsidi berisiko menekan daya beli, menambah jumlah penduduk miskin baru, hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor UMKM.

Bhima menilai, langkah yang lebih mendesak justru menutup kebocoran solar subsidi, khususnya yang selama ini dinikmati sektor tambang dan perkebunan sawit.

“Jadi, pembatasan ketat di SPBU dimulai dengan angkutan logistik perusahaan ekstraktif. Lagipula ditengah harga komoditas naik, perusahaan tambang dan sawit mendapat windfall keuntungan besar. Jangan sampai negara bocor berikan solar subsidi ke perusahaan yang labanya besar, sementara konsumen rumah tangga diperkerat pembelannya,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah memperluas subsidi transportasi publik, bahkan hingga tarif sangat murah, untuk menekan konsumsi BBM melalui peralihan dari kendaraan pribadi.

“Di luar Jabodetabek, perlu koordinasi dengan pmda untuk mempercepat pembangunan transportasi umum,” katanya.

Dampak Fiskal

Tak hanya itu, di sisi fiskal, keputusan menahan harga BBM—atas arahan Presiden Prabowo Subianto—menyimpan konsekuensi terhadap keberlangsungan fiskal jangka panjang. Pasalnya, selisih harga minyak dunia dengan asumsi Indonesia Crude Oil Price (ICP) dalam APBN kini sudah melampaui 30 dolar AS per barel.

Tanpa realokasi anggaran, beban subsidi berpotensi melebar menjadi defisit di atas 3 persen dari PDB. “Kecuali ada pergeseran anggaran dari program seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) ke subsidi energi, maka rasional kenaikan harga BBM bisa ditahan,” tutur Bhima.

Ekonom Universitas Air-langga, Wisnu Wibowo, menilai kenaikan harga BBM memang bisa menjadi opsi terakhir. Namun, ia menekankan bahwa tanpa melepas harga BBM subsidi mengikuti mekanisme pasar, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak dari asumsi makro bisa menambah beban fiskal sekitar Rp6,7 triliun.

Menurut dia, pemerintah baru akan mempertimbangkan kenaikan jika rata-rata harga minyak tahunan mendekati 90 dolar AS per barel dan mulai mengancam stabilitas fiskal.

“Jika pun pemerintah akan mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM, maka hal tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan besaran yang memperhatikan aspek psikologis dan daya beli masyarakat dan sektor industri dengan angka kenaikan harga BBM tidak akan melebihi 10 persen,” jelasnya.

Di luar kebijakan harga, Wisnu menekankan pentingnya menjalankan langkah non-fiskal. Pemerintah perlu memperkuat diplomasi dengan Iran agar kapal tanker Indonesia yang tertahan di Teluk Persia dapat melintasi Selat Hormuz.

Langkah ini krusial, mengingat sekitar seperempat perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Selain itu, pemerintah perlu mencari sumber pasokan alternatif—seperti dari AS, Brasil, atau Nigeria—serta memperkuat pengelolaan cadangan dan distribusi BBM dalam negeri guna mencegah kelangkaan di sejumlah wilayah.

“Dan yang juga tidak kalah penting adalah pemerintah perlu mengatur dan mengawasi cadangan minyak dalam negeri secara disiplin dan mengawasi distribusi secara berhati-hati untuk mencegah kelangkaan pasokan BBM di beberapa wilayah,” tegas Wisnu. (D2)

Bupati Ciamis Buka Kegiatan Manasik Haji Halaman 1

mampu, baik secara fisik maupun finansial. Ia menyebutkan bahwa haji bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik yang prima.

Menurutnya, kegiatan manasik haji memiliki peran penting dalam memberikan pembekalan kepada para calon jemaah. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman serta simulasi praktik agar mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. “Manasik ini menjadi bekal penting agar para jemaah dapat menjalankan ibadah secara tertib, sah, dan mandiri,” tegas Herdiat.

Bupati juga mengingatkan para calon jemaah untuk mulai menjaga kesehatan sejak dini. Ia menekankan pentingnya kesiapan fisik mengingat perbedaan kondisi cuaca an-

tara Indonesia dengan Kota Mekkah dan Madinah yang cukup signifikan. “Luruskan niat, ikhlaskan diri semaksimal untuk beribadah, dan siapkan fisik dari sekarang,” pesan Herdiat.

Selain itu, Bupati Ciamis turut mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar. Di tengah kondisi beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami konflik, Bupati Ciamis berharap situasi tersebut tidak berdampak pada keberangkatan jemaah haji asal Ciamis.

“Mudah-mudahan semua berjalan lancar, para jemaah diberikan keselamatan dari berangkat hingga kembali lagi ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga,” harap Herdiat.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Ka-

bupaten Ciamis H Nana Supriatna Sag MA melaporkan bahwa kegiatan manasik haji ini merupakan salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan ibadah haji.

Ia menyebutkan, jumlah peserta manasik tahun ini mencapai 856 orang, dengan rentang usia yang cukup beragam, mulai dari 17 tahun hingga 96 tahun. “Tujuan manasik haji ini adalah memberikan pemahaman, simulasi praktis, serta pembekalan ilmu agar calon jemaah dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri, tertib, sah, serta sesuai rukun dan wajib haji,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh calon jemaah haji Kabupaten Ciamis dapat menjalankan ibadah dengan lancar, khususnya, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. (Mamay)

Bupati Simalungun Hadiri Grand Opening Halaman 1

raja Kelurahan Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa berjalan khidmat dengan antusias masyarakat yang tinggi. Peresmian cabang baru ini menjadi tonggak penting untuk memperluas jangkauan layanan perbankan di wilayah tersebut.

Kehadiran bupati didampingi jajaran pejabat daerah, Camat Tanah Jawa Andi Supandri, Forkopimca termasuk Kepala Puskesmas dr Widia, serta tokoh masyarakat Muhammad Jusuf Sirait. Rombongan disambut hangat oleh manajemen dan staf Bank BNI, mencerminkan sinergi erat antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.

Acara seramak dan penuh

makna ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur serta penggungitan pita bersama perwakilan manajemen Bank BNI.

Dalam sambutannya, bupati mengapresiasi keberadaan cabang baru yang dinilai mempermudah akses layanan keuangan untuk transaksi harian maupun pengembangan usaha.

Bupati menekankan pentingnya pembiayaan bagi UMKM, dengan mengharapkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi solusi permodalan agar usaha kecil tumbuh dan berdaya saing. Selain itu, layanan perbankan digital yang modern juga dianggap membantu masyar-

akat bertransaksi cepat, aman, dan efisien, sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

Acara dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, dan pelaku usaha lokal yang mengharapkan peningkatan akses layanan keuangan.

Bank BNI diharapkan tidak hanya sebagai pusat layanan perbankan, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pemkab Simalungun optimistis inklusi keuangan akan meningkat, membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

(RD)

Pelepasan 300 Purna Siswa SMAN I Halaman 1

wa-siswi kelas XII SMAN1 Blambangan Umpu siap mengikuti wisuda purna siswa. Tentu semua rangkaian acara ini dapat terlaksana dan sukses berkat kerjasama seluruh warga sekolah.

“Dari 300 wisuda siswa ini, 8 siswa yang telah lulus jalur prestasi, sementara siswa lainnya sedang mengikuti tes untuk masuk di suatu perguruan tinggi demi melanjutkan studi masing-masing. Dengan demikian kami berharap semoga siswa-siswi yang sedang berjuang memasuki perguruan tinggi dapat lolos diterima,” harapnya.

Sunaryo lebih lanjut menyebut, selama tiga tahun mendidik anak-anak dan kali ini akan diserahkan kembali kepada wali atau orang tua murid.

Ia juga tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih

kepada seluruh wisuda purna siswa, yang telah mendonasikan dananya guna pembangunan Mushola SMAN1 Blambangan Umpu.

Di akhir pidatonya, kepala sekolah tak lupa menyampaikan, atas nama keluarga besar SMAN I Blambangan Umpu mengucapkan terimakasih kepada panitia penyelenggara atas kerja samanya, sehingga seluruh rangkaian acara berjalan dengan sukses.

Sementara Pengawas Sekolah dari Provinsi Lampung Sugeng, menyampaikan selamat kepada siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Dijelaskannya, purna siswa ini bukan berarti perjuangan berhenti sampai di sini, tetapi adalah awal kembali untuk meniti sebuah pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya ia berpesan agar siswa

memiliki semangat tinggi, mempunyai skill dan jiwa berkarakter. “Semoga kedepan anak-anak semua menjadi sukses,” pesan Sungeng.

Pada kesempatan itu, Sugeng mengemukakan bahwa SMAN I Blambangan Umpu masih masuk dalam level B, sehingga dihimbau kepada dewan guru SMAN I Blambangan Umpu, kedepan agar lebih semangat lagi dalam membina dan membimbing siswa-siswinya.

Suasana bertambah haru saat ucapan terimakasih dari siswa-siswi SMAN I Blambangan Umpu disampaikan oleh perwakilan para wisudawan.

Acara seremonial diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada wisudawan-wisudawati, dilanjutkan foto bersama.

(Suhaili)





Plt. Bupati Pekalongan Sukirman :

Tradisi Syawalan Megono, Harus Kita Jaga Agar Tetap Lestari Dan Pemkab Akan Terus Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Kab Pekalongan, Jaya Pos. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, membuka Harmoni Syawalan Megono yang digelar di obyek wisata Linggoasri, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Megono merupakan makanan khas kabupaten Pekalongan yang sudah ada sejak dahulu. Tradisi megono gunung berasal dari tradisi Syawalan yang dilakukan secara sederhana oleh masyarakat di rumah atau di masjid.

Melalui pemerintah kabupaten Pekalongan bahwa Tradisi ini dilakukan di objek wisata Linggoasri setiap hari ke depan bulan Syawal. Acara tersebut menggunakan 20 kg beras ketan dan dibuat menjadi gunung rakasasa dengan sayur gori atau nangka.

Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan karena mengandung nilai silaturahmi, nilai ekonomi, dan nilai sosial budaya yang sangat kuat.

Kegiatan rutin tahunan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Syawalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan membagikan sebanyak 10.000 bungkus nasi megono kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Dae-



rah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan meliputi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, Kaprolres Pekalongan, Rahmat C. Yusuf, perwakilan Kodim 0710/Pekalongan, perwakilan Kejari Kabupaten Pekalongan, perwakilan Pengadilan Negeri Pekalongan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, para asisten Sekda, kepala OPD, para camat, serta Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, Ny. Galuh Kirana Sukirman.

Acara Syawalan dimeriahkan dengan lomba kreasi sajian megono yang diikuti perwakilan dari 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Kehadiran para bakul kuliner

legendaris turut menambah daya tarik acara, ditambah dengan hiburan panggung musik yang membuat suasana semakin semarak.

Dalam lomba kreasi sajian megono tersebut, Kecamatan Karangdadap berhasil meraih juara I, disusul Kecamatan Panninggaran sebagai juara II, dan Kecamatan Karanganyar sebagai juara III. Sementara itu, juara harapan I diraih Kecamatan Bojong, juara harapan II Kecamatan Siwalan, dan juara harapan III Kecamatan Kesesi.

Disamping itu, juga diberikan hadiah kepada Kecamatan Wiradesa sebagai juara terinovatif dan Kecamatan Panninggaran sebagai juara terfavorit.

Penghargaan pemenang diserahkan secara simbolis oleh Plt. Bupati Sukirman dan Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan Ny. Galuh Kirana Sukirman.

Plt. Bupati Sukirman dalam sambutannya menyampaikan perbedaan waktu pelaksanaan syawalan tahun ini tidak perlu diperseolkan. Menurutnya, hal tersebut justru mencerminkan keberagaman yang harus disyukuri Bersama. "Lebaran kali ini memang berbeda karena ada yang melaksanakan hari Jum'at dan Sabtu. Namun perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Ini adalah kebhinekaan yang harus kita syukuri bersama," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa



tradisi syawalan memiliki makna mendalam, tidak sekadar ajang berkumpul. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, melestarikan budaya, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap kearifan lokal, salah satunya melalui sajian khas sego megono. "Tradisi ini telah diwariskan oleh para leluhur, para kiai, dan para pemimpin kita. Di antaranya, Syawalan menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi di antara kita, menjaga kebersamaan, serta nguri-nguri kebudayaan agar terus tumbuh dan berkembang," katanya. Kajen, Jum'at (27/03/2026)

Sukirman berharap tradisi syawalan yang dipadukan dengan kuliner khas daerah

dapat terus dipromosikan secara luas. "Sego megono beserta tradisi Syawalan ini harus terus kita kampanyekan dan sosialisasikan ke seluruh Nusantara agar menjadi tradisi yang tetap lestari serta mampu mendatangkan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sukirman juga menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta seluruh Forkopimda, kami

menyampaikan selamat Idul Fitri 1447H, mohon maaf lahir dan batin," katanya.

"Ada prestasi, ada kekurangan. Dalam hal prestasi tentu ini adalah kewajiban kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Tetapi dalam hal kekurangan tentu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang sekaligus melengkapi hal-hal yang kurang," lanjutnya.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kinerja, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, serta mempertahankan berbagai capaian yang telah diraih.

"Tentu saja kami akan terus berkonsentrasi terutama mengisi kekosongan-kekosongan, kelemahan-kelemahan kita dalam membangun. Misalnya dalam sisi infrastruktur, pelayanan Kesehatan, dan seterusnya, akan terus kita tingkatkan. Segala prestasi yang sudah kita raih bersama-sama ini tentu wajib kita tingkatkan, wajib kita pertahankan demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan," pungkasnya.

(ADV/Prokompim)

Tarawih Keliling, Pemkab Tangerang Hadir Perkuat Silaturahmi dan Wujudkan Pembangunan Bersama



Tangerang, Jaya Pos. Ramadhan adalah bulan suci yang penuh berkah, di mana ibadah mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membuka kesempatan emas bagi pemerintah untuk semakin dekat dan mendengar suara masyarakat.

Di Kabupaten Tangerang, program Tarawih Keliling (Tarling) kembali digelar secara masif sebagai wujud silaturahmi tulus dan ajang menyerap aspirasi warga secara langsung, bukti nyata komitmen pemerintahan yang pro-rakyat.

Dengan wilayah luas mencakup 29 kecamatan, Pemkab Tangerang membentuk 7 regu Tarling yang bergerak setiap hari ke berbagai masjid di seluruh kabupaten. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Moch Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan daerah lainnya.

Masing-masing memimpin regu di lokasi berbeda. Ribuan jamaah kini merasakan kehangatan salat tarawih berjamaah bersama pemimpinnya, di tengah suasana



Ramadan yang penuh makna dan kebersamaan.

Lebih dari sekadar ibadah bersama masyarakat dan tokoh agama, Tarling menjadi momen berharga untuk menyampaikan hasil pembangunan terkini, kebijakan yang sedang dijalankan (seperti percepatan infrastruktur jalan), serta rencana ke depan sambil mendengarkan langsung masukan, harapan, dan aspirasi warga.

Inilah cara pemerintah menjadikan suara rakyat sebagai dasar pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Sebagai dukungan

konkret bagi kemakmuran rumah ibadah, Pemkab Tangerang menyerahkan hibah/bantuan langsung Rp.20 juta kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di setiap lokasi kunjungan.

Bantuan ini membantu pemeliharaan masjid, penguatan kegiatan keagamaan, dan pembinaan umat, membuktikan kepedulian nyata terhadap syiar Islam dan kesejahteraan spiritual masyarakat.

Momen istimewa terjadi di Kecamatan Sepatan, Bupati Moch Maesyal Rasyid mendampingi Gubernur

Banten Andra Soni dalam Safari Ramadhan Provinsi Banten 1447 H di Masjid Jami' Awwabin, sinergi provinsi dan kabupaten yang memperkuat kehadiran pemerintah di tengah warga.

Bupati Moch Maesyal Rasyid menyampaikan, agenda Tarling ini menjadi kegiatan rutin tahunan. "Kami ingin terus hadir di tengah masyarakat, memperkuat silaturahmi, dan memastikan suasana Ramadan berjalan aman, nyaman, serta kondusif," ucapnya.

Safari Ramadhan, katanya, bukan hanya seremonial, tetapi menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam suasana penuh keberkahan.

"Kami juga mengajak warga menjaga kerukunan agar perbedaan menjadi perekat pembangunan bersama," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menekankan pentingnya memperkuat harmoni dan keasrian di tengah masyarakat melalui kehadiran di masjid-masjid.



"Safari Ramadhan ini menjadi kesempatan untuk berdialog langsung, mendengar aspirasi warga, serta mendukung pemakmuran masjid sebagai pusat pembinaan akhlak dan moral generasi muda. Mari kita jaga kebersamaan ini demi Kabupaten Tangerang yang lebih baik," ujarnya.

Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah turun langsung ke Masjid Al Falah, Perum Griya Serpong, Desa Suradita, Kecamatan Cisaik, berdialog hangat dengan masyarakat dan tokoh agama, sekaligus

menyerahkan bantuan untuk masjid setempat, menunjukkan kepedulian yang tulus.

Tarling bukan sekadar seremonial atau agenda tahunan biasa. Ini adalah bukti nyata janji pemerintahan Maesyal-Intan: hadir langsung, mendengar suara rakyat, dan bertindak untuk kemajuan bersama.

Melalui dialog terbuka ini, aspirasi masyarakat terserap, silaturahmi tererat, dan pembangunan Kabupaten Tangerang semakin maju dalam kebersamaan penuh berkah. (ADV)



Pembinaan Tertib Administrasi PKK Nagori Bandar Tinggi Langkah Maju Pembinaan Nagori

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Tim Penggerak PKK hadir langsung untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Nagori Percontohan Tertib Administrasi, di Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam, Sumatera Utara, Kamis (2/4/2026).

Suasana penuh semangat dan kekeluargaan menyelimuti Kantor Pangulu Nagori Bandar Tinggi, sekaligus menjadi momen pengukuhan Nurismanja Safi sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Bandar Masilam.

Acara ini dipimpin oleh Staf Ahli TP PKK Kabupaten, Ny Yulince Mixnon Andreas Simamora, mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Ny Darmawati Anton Achmad Saragih. Dalam arahnya, Yulince menekankan bahwa administrasi yang rapi bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan cerminan dari kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.

"Administrasi yang baik adalah kunci agar seluruh pro

▶▶Halaman 11



Ketua TP PKK Lakukan Nagori

Semangat Gotong-Royong Sambut Lomba PKK Babinsa Siantar Selatan Turun Langsung Bersama Warga



Babinsa Siantar Selatan gotong royong bersama warga

Simalungun, Jaya Pos

Dalam rangka menyambut perlombaan PKK, Babinsa Koramil 03/Siantar Selatan Kodim 0207/Simalungun Sertu Prayoto, menunjukkan peran aktifnya dengan terjun langsung dalam kegiatan gotong-royong bersama perangkat kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Suka Makmur, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan, dimana Babinsa, aparat kelurahan, serta warga bahu-membahu membersihkan lingkungan, merapikan fasilitas umum, dan mempersiapkan kawasan sebagai bentuk persiapan menghadapi lomba PKK.

Sertu Prayoto mengatakan bahwa keterlibat

▶▶ Halaman 11

Pastikan Arus Balik Aman dan Lancar, Anwar Sadat Tinjau Pelabuhan Roro

Kualatungkal, Jaya Pos

Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.



Bupati Saat Tinjau di Pelabuhan RORO Kualatungkal

▶▶ Halaman 11

Pemko Siapkan Transformasi Kota yang Makin Maju dan Kompetitif

Padang Panjang, Jaya Pos

Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mempertegas arah pembangunan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPd yang digelar di Balai Kota,



Walikota Padang Panjang, Hendri Amris.

▶▶ Halaman 11

81 Kepsek Baru di Garut Terima SK

Garut, Jaya Pos

Dinas pendidikan Kabupaten Garut banyak membutuhkan kepala sekolah baik SD maupun SMP. Sejak tahun 2025 kebutuhan tersebut dibuka oleh MENDAGRI yang telah mengundang langsung kepada setiap Guru yang berminat baik ASN



81 Kepsek Baru di Garut saat serah terima

▶▶ Halaman 11

Angin Hujan Disertai Petir Tidak Bisa Diprediksi BPBD Mukomuko Himbau Masyarakat Lebih Waspada



Kantor BPBD Kabupaten Mukomuko Bengkulu

Mukomuko, Jaya Pos

Beberapa pekan terakhir Mukomuko kerap dilanda angin kencang hujan deras disertai petir terutama terjadi pada sore hari hingga malam hari meski demikian menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu peristiwa itu tidak dapat diprediksi kadang terjadi diluar prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Mukomuko Ruri Irawan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dody Leo Saputra menyampaikan, berdasar tupoksi kita menghimbau pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan apabila saat terjadi angin kencang hujan disertai petir baik bagi dalam perjalanan, berteduh maupun tengah melakukan aktifitas ungkap

▶▶Halaman 11

Ketua DPRD Langkat Hadiri Bukber KNPI, Ajak Pemuda Bersatu Bangun Daerah

Langkat, Jaya Pos

Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Langkat, Rabu (18/3/2026).

Kegiatan bertema "Pemuda Bersatu, Langkat Maju" tersebut berlangsung



DPD KNPI Langkat Buka Puasa Bersama Forkopimda dan Pemkab Langkat

▶▶Halaman 11

Desakan Hak Angket DPRD Babel Muncul Usai Wagub Hellyana Keluhkan Fasilitas Kedinasan

Belitung, Jaya Pos

Polemik hubungan kerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Belitung (MPB) mendesak DPRD Babel menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan tersebut.

Desakan itu muncul setelah Wakil Gubernur Ba-

bel, Hellyana, melayangkan surat resmi kepada Gubernur terkait keluhan minimnya dukungan fasilitas dan personel dalam menjalankan tugas kedinasan.

Surat bernomor 000.1.4/0003/VII/2026 tersebut berisi pengaduan sekaligus permohonan peneraan dukungan fasilitas dan perangkat kerja Wakil Gubernur.



Kelompok Masyarakat Peduli Belitung Ketua Hadi Adjin, Sekretaris Sabriansyah, Koordinator Muhdi, Marwansyah Dan Pakar, Pemerintahan Ir. Suryadi Saman, M.Sc.

▶▶Halaman 11

93 ASN Resmi Dilantik Bupati Sukabumi



Bupati Sukabumi H Asep Japar lantik 93 Pejabat Tinggi Pratama

Sukabumi, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi kembali melakukan penguatan struktur birokrasi melalui pelantikan puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bupati Sukabumi H Asep Japar, memimpin langsung proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (1/4/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan diikuti 93 ASN yang terdiri dari tiga pejabat tinggi pratama serta 90 pegawai yang resmi diangkat sebagai PNS penuh. Adapun tiga pejabat tinggi pratama itu akan menempati jabatan strategis yang selama

▶▶Halaman 11

Mudik, Terjadi Lonjakan Penumpang di Terminal Tipe A dan Stasiun KA Kota Banjar

Banjar, Jaya Pos

Ribuan pemudik mulai memadati Stasiun dan Terminal Tipe A Kota Banjar pada H+4 arus balik Lebaran. Pihak pengelola memprediksi puncak pergerakan penumpang angkutan umum tersebut akan terus berlangsung hingga malam hari.

Memasuki H+4 lebaran Idul

Fitri, ribuan pemudik yang hendak kembali ke kota mulai memadati Stasiun Kota Banjar, beberapa waktu lalu.

Humas Daop 2 Bandung Kuwardoyo, mengatakan, berdasarkan data manifest per 24 Maret 2026 penumpang berangkat dari Stasiun Banjar 1.232 penumpang.

Adapun data kumulatif dari tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan hari ini arus keberangkatan penumpang dari Stasiun Banjar mencapai 10.745 orang. Sedangkan penumpang datang di Stasiun Banjar per 24 Maret 2026 ini mencapai 1.001 penumpang dengan data kumulatif dari tanggal 11 Maret sam-

pai hari ini 16.648 penumpang.

Menurutnya, berdasarkan data manifest penumpang, arus balik pemudik dari Stasiun Kota Banjar sementara ini terjadi pada 22 Maret 2026 dengan jumlah 1480 penumpang. "Data sampai saat ini

▶▶Halaman 11



Para penumpang memadati Stasiun Kota Banjar pada arus balik. (Foto:Mamay)

Peragaan 10 Adegan Polres Pematangsiantar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Cafe Lotta

Pematangsiantar, Jaya Pos

Polres Pematangsiantar melaksanakan reka ulang atau rekonstruksi kasus pembunuhan di Cafe Lotta, Jl Kartini Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Kamis (2/4/2026) sikara pukul 11.00 Wib. Rekonstruksi itu dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Sandi Riz Akbar STrk SIK MH serta personel Sat Reskrim.

Dalam rekonstruksi tersangka

VS dan RGN dihadirkan langsung menjelaskan 10 adegan yang menggambar kejadian mulai dari awal hingga terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun korban dalam kasus ini inisial AP.

Selain kedua tersangka turut juga dihadiri 11 orang saksi yang menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa yang terjadi.



Rekonstruksi kasus pembunuhan peragaan 10 adegan

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur TM Sitingjak SH SIK MH melalui PS Kasi Humas IPTU Agustina Triyadewi mengatakan, kegiatan rekonstruksi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan guna melengkapi berkas perkara serta memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Rekonstruksi juga disaksikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bahan dalam proses

hukum selanjutnya.

Kedua tersangka sampai saat ini sudah ditahan di Polres Pematangsiantar dan dipersangkakan melakukan tindak pidana: barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 458 KUHPidana juncto Pasal 262 ayat (1) dan ayat 4 KUHPidana. (RD)

Semangat Kolaborasi di Tengah Keterbatasan Musrenbang RKPD 2027 Tegaskan Optimisme Pembangunan Ciamis



Musrenbang RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2027 digelar di Aula Adipati Angganaya Bapperida, Senin (30/3). (Foto: Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis justru menunjukkan optimisme kuat dalam merancang pembangunan masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2027 yang digelar di Aula Adipati Angganaya Bapperida Kabupaten Ciamis, Senin (30/3).

Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi kemajuan daerah. Justru, menurutnya, kekuatan utama pembangunan Ciamis terletak pada semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat.

Mengawali sambutannya, Bupati Ciamis terlebih dahulu menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah sekaligus permohonan maaf kepada seluruh peserta Musrenbang. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para narasumber yang akan memberikan masukan strategis bagi pembangunan Kabupaten Ciamis ke depan. "Musrenbang ini jangan hanya menjadi kegiatan rutinitas atau seremonial semata. Kita berharap seluruh materi yang disampaikan dapat terserap, terencana, terprogram dan terukur, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah," tegas Herdiat.

Menurutnya, secara formal ruang fiskal Kabupaten Ciamis memang mengalami penurunan. Namun secara substansi, kekuatan fiskal daerah justru semakin baik karena meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ia mencontohkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diberikan secara stimulan sebesar Rp20 juta. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat mampu meningkatkan nilai pembangunan hingga mencapai Rp100 juta di beberapa desa di Kecamatan Panjalu. "Ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar kita bukan hanya APBD, tetapi kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Ini modal sosial yang luar biasa bagi Kabupaten Ciamis," ungkapnya.

Bupati Ciamis memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis saat ini berada di angka sekitar Rp374 miliar, dimana sebagian besar telah dialokasikan untuk BLUD Rumah Sakit dan pembayaran PJU, sehingga ruang fiskal riil yang dapat digunakan relatif terbatas. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat pembangunan.

Bahkan, di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Ciamis mampu mempertahankan kemandirian jalan kabupaten hingga mencapai 90%. Hal tersebut dinilai sebagai bukti nyata efektivitas pembangunan berbasis kolaborasi.

Selain itu, kontribusi masyarakat juga terlihat dari penghimpunan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas yang mencapai lebih dari Rp20 miliar, serta gerakan Jumat Bersih yang dilakukan secara rutin oleh OPD hingga tingkat desa dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyoroti pentingnya pembangunan non fisik, khususnya perlindungan perempuan dan anak. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 tercatat 83 kasus kekerasan, dengan 50 kasus melibatkan perempuan dan anak, yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Untuk itu, kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sosial tersebut, sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana, menyampaikan bahwa meskipun ruang fiskal semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap memiliki semangat dan komitmen kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmen untuk terus membangun daerah secara kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran. (Mamay)

Polres Binjai Grebek dan Musnahkan Barak Narkoba di Kecamatan Selesai, Diduga Penggrebekan Sempat Bocor

Binjai, Jaya Pos

Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Binjai kembali menggelar operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, pada Kamis (2/4/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Penggrebekan tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di sebuah barak yang berada di wilayah tersebut.

Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, langsung memimpin tim menuju lokasi untuk melakukan penindakan. Namun setibanya ditempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya pelaku maupun pengguna narkoba di dalam barak tersebut.

"Barak dalam keadaan kosong. Diduga penggrebekan ini telah bocor terlebih dahulu," ujar AKP Ismail Pane.

Meski tidak menemukan pelaku, petugas tetap melakukan penyisiran di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan

sejumlah barang bukti berupa lima plastik klip, sepuluh pipet, serta satu alat hisap sabu (bong) yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Sebagai tindak lanjut, petugas langsung melakukan pembongkaran terhadap barak tersebut dan memusnahkannya dengan cara dibakar di lokasi. Kapolres Binjai, AKBP Mirzal Maulana melalui Kasi Humas AKP Junaidi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk menindak tegas lokasi-lokasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Diketahui, meskipun secara administratif lokasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Langkat, namun secara hukum penanganannya berada di bawah naungan Polres Binjai.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi guna membantu pemberantasan narkoba di wilayah tersebut. (Fatimah)



Barak narkoba di Desa Perhiasan dibakar Satres Narkoba Polres Binjai

Pemko Binjai Lepas 52 Calon Haji Nasabah Bank Sumut Ikuti Manasik Akbar

Binjai, Jaya Pos

Pemerintah Kota Binjai melalui Asisten Administrasi Umum Setdako Binjai, Drs. Eka Edi Saputra melepas 52 calon jemaah haji nasabah PT Bank Sumut Cabang Binjai untuk mengikuti Manasik Haji Akbar di Asrama Haji Medan, Kamis (2/4/2026).

Pelepasan dilakukan di halaman Kantor Bank Sumut Cabang Binjai, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kartini,

Kecamatan Binjai Kota, ditandai dengan keberangkatan satu unit bus menuju lokasi kegiatan.

Eka Edi Saputra menyampaikan bahwa manasik haji bertujuan membekali calon jemaah dengan pemahaman menyeluruh terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menjalankannya dengan tertib dan khusuk.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini

merupakan program rutin PT Bank Sumut sejak 2006 sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah, yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 dan kembali dilaksanakan tahun ini.

Pemerintah Kota Binjai juga mengapresiasi inisiatif tersebut serta mengimbau para calon jemaah untuk menjaga kesehatan agar dapat menjalankan ibadah haji secara optimal. (Fatimah)

Optimalkan Deteksi Dini Kanker Serviks

TP PKK Simalungun Gelar Pembinaan Iva Test

Simalungun, Jaya Pos

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun menyelenggarakan kunjungan pembinaan terkait Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) Rabu, (01/04/2026, di Kecamatan Bandar Hulan, Sumatera Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau implementasi program PKK di tingkat nagori sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA Test.

Lokasi pembinaan dilakukan di dua tempat, yaitu Balai Harunguan Tuan Rondahaim Kantor Kecamatan Bandar Hulan dan Puskesmas Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

Acara dihadiri oleh jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Simalungun serta perwakilan dari berbagai instansi terkait,

antara lain Kepala Dinas Sosial Osnidar Marpaung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tiarli Sinaga, Kepala Dinas BKKBN Gimrood Sinaga, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Akbar Putera Siregar, serta Kepala Puskesmas Bandar Hulan dr Imas Wirdaningsih.

Akbar Putera Siregar, yang menjabat sebagai Camat Bandar Hulan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan TP PKK.

Akbar mengungkapkan bahwa pihak kecamatan bersama Puskesmas telah aktif melakukan sosialisasi IVA Test kepada masyarakat, dan pembinaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Staf Ahli PKK Ny Yulince Mixnon Andreas



Kepala Dinas Kominfo Simalungun di acara Iva Test

Simamora atas nama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan.

Kanker serviks, yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, dapat dicegah jika terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, seluruh kader

PKK, tenaga kesehatan, dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan IVA Test secara rutin.

Ny Yulince juga menekankan peran kader PKK sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi agar kaum ibu tidak ragu melakukan pemeriksaan.

Selain itu, terkait persiapan Nagori Percontohan tingkat Provinsi Sumatera

Utara, Kecamatan Bandar Hulan diharapkan menunjukkan komitmen dan kesiapan maksimal dari aspek administrasi, partisipasi masyarakat, hingga capaian program.

Sementara itu, Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Simalungun Ny Lurinin Purba menegaskan bahwa upaya pencegahan dan deteksi dini kanker serviks melalui IVA Test sangat penting, mengingat kesehatan ibu merupakan kunci utama keluarga sejahtera.

Ny Lurinin mengimbau seluruh desa di Kecamatan Bandar Hulan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan IVA Test dengan pendataan yang baik dan pelaporan berkala.

Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke Puskesmas Bandar Hulan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pemeriksaan IVA Test terhadap masyarakat setempat. (Isnani)

Arus Mudik Lebaran 2026 Penumpang Bandara H AS Hanandjoeddin Naik



Trend kenaikan penumpang memadati area di Bandara Hanandjoeddin (ilustrasi).

Belitung, Jaya Pos

Pergerakan penumpang di Bandara H AS Hanandjoeddin (TJQ), Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan tren positif selama arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026.

Berdasarkan data Posko Monitoring periode 13–25 Maret 2026, jumlah penumpang meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, kinerja angkutan kargo justru mengalami penurunan.

General Manager Bandara H AS Hanandjoeddin, Hermindya Arie Setyawan, mengatakan pihaknya telah bersiaga penuh dalam mengatur penerbangan serta pelayanan penumpang selama periode Lebaran.

Ia menyebut, peningkatan jumlah kedatangan penumpang didukung koordinasi lintas sektor yang melibatkan TNI/Polri, Karantina, Imigrasi, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Perhubungan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Pergerakan pesawat tercatat 17 penerbangan atau naik 41,7 persen dibanding 2025 yang hanya 12 penerbangan. Jumlah penumpang mencapai 2.521 orang atau meningkat 32,1 persen dari 1.909 orang tahun lalu.

Di sisi lain, kargo harian tercatat 3,9 ton atau turun 18,8 persen dibandingkan 4,8 ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, total pergerakan pesawat mencapai 175 penerbangan atau tumbuh 12,2 persen dari 156 penerbangan pada 2025. Jumlah penumpang mencapai 29.926 orang atau naik 7,2 persen dari 27.911 orang.

Namun, total kargo tercatat 110,8 ton atau turun 16,6 persen dibandingkan 132,9 ton pada periode sebelumnya. Seluruh trafik penerbangan masih didominasi rute domestik, tanpa adanya penerbangan internasional selama periode tersebut.

Dari sisi ketepatan waktu, On Time Performance (OTP) harian tercatat 70,6 persen, dengan 12 penerbangan tepat waktu dan 5 mengalami keterlambatan dari total 17 penerbangan.

Sementara OTP kumulatif mencapai 76 persen, dengan 133 penerbangan tepat waktu dan 42 mengalami delay dari total 175 penerbangan.

Tingkat keterisian penumpang (load factor) juga tergolong tinggi. Secara harian mencapai 88,8 persen, yakni 2.521 penumpang dari total 2.806 kursi. Secara kumulatif bahkan menyentuh 97,09 persen.

Adapun pemanfaatan slot penerbangan dan realisasi extra flight tercatat optimal, dengan tingkat keterisian mencapai 100 persen baik secara harian maupun kumulatif. (Yustami)

Bupati Tanjabbar Tegaskan Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel



Bupati (kanan) Saat Tandatangani Naska di BPK RI Perwakilan Prov. Jambi

Kualatungkal, Jaya Pos

Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Anwar Sadat, kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadirannya dalam kegiatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa (31/03/26).

Penyampaian LKPD ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan terbuka.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anwar Sadat secara langsung menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha SE., M.Si.

Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.

Bupati menyampaikan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan bagian penting dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan penyampaian LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar berharap dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dalam pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. H. Muhammad Yunus, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ahmad Jais, S.E., M.E.

(tenk/Kominfo- Tjb)

Diduga Selewengkan Dana Desa Rp 320 Juta, Kades Sari Makmur Terancam Jerat Pidana Korupsi

Palangkaraya, Jaya Pos

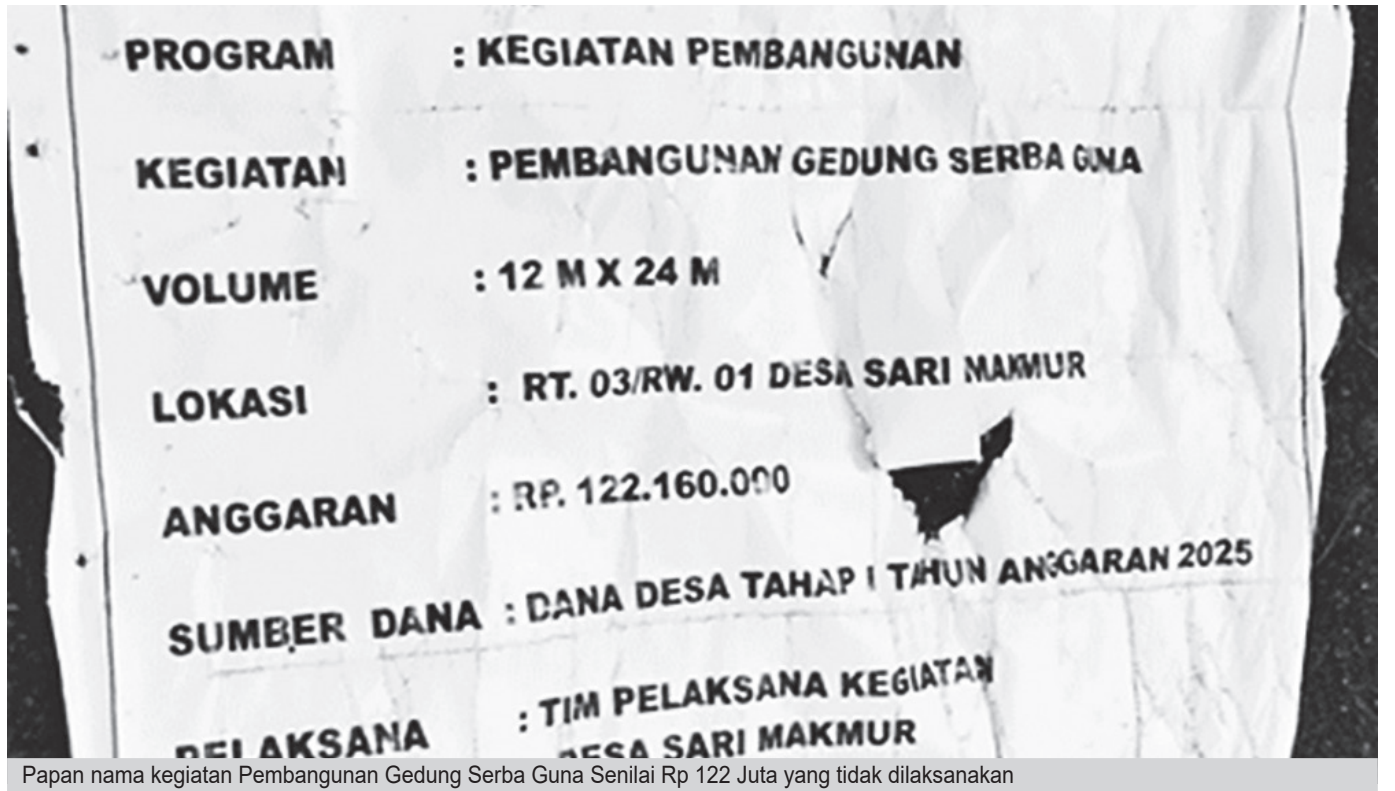
Kepala Desa Sari Makmur (UPT Lamunti II C3), Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berinisial NB, diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai kurang lebih Rp 320 juta.

Dugaan tersebut muncul setelah hasil monitoring dan evaluasi (monev) pihak kecamatan menemukan sejumlah program yang telah dianggarkan dalam APBDDes tidak direalisasikan di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, dana yang diduga tidak dilaksanakan itu meliputi pembangunan gedung serba guna sekitar Rp 122 juta, program ketahanan pangan sekitar Rp 140 juta, satu paket rumah layak huni sekitar Rp 10 juta, serta pengadaan satu unit sepeda motor dinas sekitar Rp 30 juta.

Jika benar terjadi, perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20



Papan nama kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna senilai Rp 122 Juta yang tidak dilaksanakan

tahun, serta denda hingga Rp 1 miliar.

Sementara Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, diancam pidana penjara maksimal 20 tahun.

Selain itu, jika terdapat unsur penggelapan dalam jabatan, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan.

Camat Mantangai, Elargo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menyatakan, hasil monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan menemukan bahwa sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

“Benar, sesuai hasil monitoring evaluasi kami di lapangan, kegiatan yang dianggarkan itu tidak ditemukan realisasinya,” ujar Elargo.

Menurutnya, laporan hasil monev telah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) serta Inspektorat

Daerah Kabupaten Kapuas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku. Namun hingga kini, ia mengaku belum menerima informasi terkait tindak lanjut atas laporan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah dalam mengawal penggunaan Dana Desa, yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Sari Makmur, NB, yang telah dikonfirmasi melalui

surat resmi tertanggal 15 Maret 2026, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas dugaan korupsi Dana Desa. Masyarakat pun mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan audit investigatif dan, jika ditemukan unsur pidana, memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

(Mandau)

Pemkab Way Kanan Gelar Halal Bihalal di Lapangan Buway Pemuka

Way Kanan, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar apel Halal Bihalal, Senin (30/03/2026), di Lapangan Buway Pemuka. Bupati Way Kanan Ayu Asalasyah selaku Pembina Apel, dalam sambutannya menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Ia menegaskan bahwa momentum usai ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan dan memperbaiki diri. “Halal bihalal ini bukan sekadar tradisi, melainkan jembatan untuk semakin mempererat persaudaraan (ukhuwah) dan membersihkan hati dari segala khilaf, agar kita dapat kembali bekerja dengan semangat yang fitri,” ujar Bupati Ayu.

Dalam arahannya, bupati juga mengajak seluruh jajaran untuk merefleksikan makna Idul Fitri. Ia mempertanyakan apa yang benar-benar tersisa



Halal Bil Halal di Lapangan Buway Pemuka.

setelah ramadan dan lebaran, apakah hanya dokumentasi semata atau ada perubahan nyata dalam diri?

Menurutnya, tantangan terbesar bukanlah menjalani ramadan, melainkan mempertahankan nilai-nilai kebaikan setelahnya. Ia menekankan pentingnya kejujuran, kedisiplinan, dan etos kerja meskipun tanpa pengawasan langsung. Lebih lanjut, bupati mengingatkan agar semangat Idul Fitri tidak

berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi titik awal

perubahan menuju kinerja yang lebih baik.

Ia mengajak seluruh ASN dan tenaga honorer untuk memulai perubahan dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. “Kalau dulu kita suka menunda, hari ini kita belajar disiplin. Kalau dulu mudah emosi, hari ini kita belajar menahan diri. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang terus dilakukan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, bupati juga menegaskan beberapa hal penting kepada

seluruh jajaran, di antaranya agar segera kembali fokus bekerja pasca libur lebaran. Seluruh perangkat daerah diminta untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama. Bupati mengajak seluruh aparat untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Kehadiran para pegawai dalam apel tersebut dinilai sebagai wujud komitmen yang harus terus dipertahankan.

Tak kalah penting, bupati mengingatkan bahwa pada tanggal 27 April mendatang, Kabupaten Way Kanan akan memperingati Hari Ulang Tahun ke-27. Untuk itu, Sekretaris Daerah beserta jajaran diminta mempersiapkan rangkaian kegiatan dengan sebaik mungkin,

termasuk penyesuaian tema dengan arah pembangunan tahun 2026, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Marilah kita memanfaatkan bulan Syawal ini untuk memperbarui niat dalam memperbaiki diri, mempererat silaturahmi, serta menjaga persatuan dan

kesatuan dalam membangun Kabupaten Way Kanan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua,” tutupnya.

Usai apel, dilanjutkan dengan bersalaman dalam suasana halal bihalal antara Bupati Way Kanan bersama Sekretaris Daerah Machiavelli Herman Tarmizi SSTP MSI, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dhelya Machiavelli, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, para Kepala OPD beserta Ketua Dharma Wanita dan jajaran, para Kepala Bagian Setdakab Camat dan Ketua TP PKK kecamatan se-Kabupaten Way Kanan, serta seluruh staf Pemerintah Kabupaten Way Kanan. (Suhaili)

Bapas Tanjungpandan Terima Kunker DPRD Beltim, Perkuat Sinergi Layanan Berbasis HAM

Belitung, Jaya Pos

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur, Jumat (27/03). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi pelaksanaan tugas pemasarakatan yang humanis dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I, Husaini Rasyid, bersama anggota. Mereka diterima Kepala Bapas Tanjungpandan yang diwakili Kasubag TU Yovie Agustian Putra, Kasubi Bimbingan Klien Dewasa M. Yeyen Purbasari, serta Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Endang Meidiansyah.

Yovie menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lin-

tas lembaga.

“Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi, sekaligus mendorong pelayanan pemasarakatan yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yovie memaparkan sejumlah inovasi layanan Bapas Tanjungpandan, seperti Bekisah, Petaling, dan Si Landuk.

Program Bekisah merupakan pendekatan edukatif dan persuasif yang menargetkan generasi muda guna menanamkan kesadaran hukum, mencegah perundungan, serta memotivasi masa depan yang lebih baik.

Sementara Petaling difokuskan pada penguatan layanan pembimbingan klien secara terarah dan berkelanjutan untuk mendukung reintegrasi sosial.



Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan yang humanis dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun Si Landuk hadir sebagai inovasi layanan yang mempermudah akses, mempercepat proses pelayanan, serta mendekatkan Bapas kepada masyarakat secara responsif.

Ketua Komisi I DPRD Belitung Timur, Husaini Rasyid, mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPRD sekaligus

tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Ini untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Bapas Tanjungpandan, sekaligus mendorong peningkatan layanan pemasarakatan yang modern, transparan, dan berkeadilan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. (Yustami)



Diterbitkan Oleh:

PT. Media Cipta Jaya Selaras

SK MENKUM & HAM RI:

Nomor: AHU-19831.40.10.2014

Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337

NPWP No: 70.947.655.0-001.000

SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271

Nomor Induk Berusaha (NIB): 022010430564

PENDIRI:

Toni Limbong, SH.

PENASEHAT:

Letjen TNI (Purn) Dr. Sutiyoso, Tom Pasaribu,

Andar Situmorang, SH. ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.

Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

Pemimpin Umum:

Drs. John Hotman Malau, M.Si

Wakil Pemimpin Umum:

Leonardus Pasaribu, SH.

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Pemimpin Perusahaan:
Toni Limbong, SH. Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris Redaksi:
Anrico Pasaribu, ST., SH. Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Manager Pemasaran/Klan:
Pahotan Sinaga Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:

Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu, ST, SH

Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:

A. Ristanto, Micoyan L,

REDAKTUR:

Dede Rostini

DESAIN GRAFIS/IT:

Agus Wiro

PHOTO GRAPHER

Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Riau:

Rikkot Manik Asprin Hutapea

Sumatera Selatan: Bangka Belitung:

Rama Yustami Al

Jambi: Sumatera Barat:

Kusuma Inrda Wijaya Zakirman

Banten: Bengkulu:

Guntur Sihombing Japri

DKI Jakarta: Lampung:

Jama Berutu Suhaili

Jawa Tengah: Jawa Barat:

M. Sofi Hendry Hutagalung

Jawa Timur: Sulawesi Selatan:

Bjounet AS Muh. Hakim

Kalimantan Tengah: Sulawesi Tengah:

Mandau Suwandi Heriyanti

Kalimantan Barat: Kalimantan Timur

.....

STAF REDAKSI:

JS. Purba | Jama Berutu | Nelson M. Hutapea,

Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH

| Michael J Manurung | Bedman Tambunan |

LITBANG:

Lamsir Limbong

SIRKULASI:

Nelson Hutapea

PENASEHAT HUKUM:

Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

REDAKSI:

Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003

Kelurahan Kedaung, Kalliangke, Jakarta Barat

Telp: (021) 5406657

e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id

Website: www.harianjayapos.com

REKENING BANK:

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka

Rek. No. : 1148-01-000156-30-1

a/n PT Media Cipta Jaya Selaras

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot

Rek. No. : 0379-01-002054-50-7

a/n Toni Limbong

- Bank BCA Cab. Daan Mogot

Rek. No. : 1984084008

a/n Toni Limbong

Dishub Segera Petakan Titik Rawan Kecelakaan Sepanjang Jalan di Kabupaten Mukomuko

Mukomuko, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan secepatnya melakukan pemetaan dan pendataan titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas sepanjang jalan di daerah itu.

Tujuan dilakukan pemetaan itu guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan seperti di tikungan jalan dan jembatan pasalnya pada titik itu kerap terjadi nya kecelakaan baik pengendara sepeda

motor maupun mobil.

Kepala Dinas Perhubungan Mukomuko Novria Eka Putra mengatakan, pentingnya ini kita lakukan dikarenakan minim rambu- rambu jalan terutama di titik rawan kecelakaan," ungkap Kadis Perhub.

Ia juga mengungkapkan, kami akan melakukan pemetaan terlebih dahulu guna memastikan berapa banyak rambu- rambu yang dibutuhkan, tidak hanya rambu- rambu jalan kita juga butuh markah jalan," ujarnya.



Novria Eka Putra, Kadis Dishub Mukomuko

"Untuk memenuhi kebutuhan ini membutuhkan anggaran tidak sedikit sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita belum mampu mengakomodir pengadaan rambu- rambu jalan tersebut," kata Novria.

Dikatakannya juga," untuk itu kita berupaya mengusulkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi kita berharap usulan kita dapat dipenuhi," demikian Kadis Perhub.

(Jpr)

Bangga Kencana Butuh Dukungan Kuat Media Serta Sinergi dari Berbagai Lintas Sektor

Bandung, Jaya Pos

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) BKKBN Provinsi Jawa Barat Adang Syamsul Hadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui sejumlah program prioritas nasional pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Adang dalam kegiatan Forum Komunikasi Media dan Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang digelar bertepatan dengan momentum pasca Idul Fitri 1447 Hijriah. "Program tahun ini lebih menitikberatkan pada pembangunan kualitas keluarga, dengan sejumlah kegiatan prioritas nasional," ujar Adang, Rabu (1/4) di Bandung.

Ia menjelaskan, program pertama adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang berfokus pada pemberian bantuan gizi, perbaikan rumah layak huni, serta penyediaan akses air bersih bagi keluarga berisiko stunting.

Program tersebut menitikberatkan pada upaya pencegahan dan edukasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Program kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), diarahkan pada penguatan layanan pengasuhan anak melalui kolaborasi dengan tempat penitipan anak (TPA) untuk menjadi daycare berstandar tinggi. Program tersebut ditujukan untuk membantu orang tua, khususnya ibu bekerja, agar dapat beraktivitas dengan tenang tanpa mengabaikan tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, BKKBN juga menginisiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan anak. Program tersebut hadir sebagai respons terhadap fenomena "fatherless" atau minimnya keterlibatan ayah secara emosional dalam keluarga. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada kelompok lanjut usia melalui program Lansia Berdaya (SIDAYA).

Program tersebut bertu-



Kegiatan sekaligus bedah buku "Membangun Keluarga Jawa Barat" sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah, media, akademisi, serta mitra lintas sektor. (Foto:Mamay)

juan menjaga lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Di sisi lain, BKKBN turut mengembangkan Super Apps Keluarga Indonesia "Siap Bahagia". Aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait peningkatan kualitas keluarga. Adang menambahkan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari strategi pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut diperkuat melalui transformasi kelembagaan serta penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. "Keluarga menjadi hulu dan hilir dalam pembangunan. Artinya, seluruh proses pembangunan kualitas manusia harus dimulai dari keluarga," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesertaan keluarga berencana (KB) sebagai fondasi pembangunan keluarga yang berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Adang mengajak insan media untuk berperan aktif menyebarkan informasi program kepada masyarakat. "Media memiliki peran penting dalam membentuk citra dan menyampaikan program kepada publik sebagai bagian dari unsur pentahelix," tegasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dan ber-

bagai pemangku kepentingan, BKKBN Jawa Barat berharap program pembangunan keluarga dapat semakin kuat. Adang juga berharap program pembangunan keluarga dapat berdampak luas di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Barat, Ferry Hadiyanto, menyoroti ketimpangan perhatian dan alokasi anggaran antara program pembangunan kependudukan dan program makan bergizi (MBG) dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Ferry, isu kependudukan dan pembangunan keluarga selama ini cenderung kalah menonjol dibandingkan program lain yang lebih populer. Ia menyebut, anggaran untuk program MBG pada 2026 mencapai lebih dari Rp300 triliun, jauh melampaui alokasi untuk sektor kependudukan. "Bukan hanya isunya yang kalah, tetapi juga anggarannya sangat jauh berbeda. Program makan bergizi bisa mencapai lebih dari Rp300 triliun, sementara untuk kependudukan belum tentu mencapai Rp50 triliun," ujar Ferry.

Ferry mengingatkan, fokus pembangunan SDM tidak seharusnya disederhanakan hanya pada aspek pemenuhan gizi melalui program makan. Ia menilai, pendekatan terse-

but berisiko tidak efektif jika tidak dibarengi dengan pembangunan keluarga sebagai unit dasar pembentuk kualitas manusia. "Pembangunan SDM itu berawal dari keluarga. Memberi makan hanya sebagian kecil dari keseluruhan proses membangun keluarga," katanya.

Ia bahkan mengkhawatirkan potensi pemborosan anggaran jika program besar tersebut tidak diintegrasikan dengan pendekatan pembangunan keluarga yang telah lama dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Kalau tidak dikawal dengan baik, anggaran sebesar itu bisa menjadi mubazir," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga mengapresiasi langkah perwakilan BKKBN Jawa Barat yang dinilai konsisten mengangkat isu pembangunan keluarga di tengah dominasi program MBG. Ia menyebut, inisiatif seperti penerbitan buku "Membangun Keluarga Jawa Barat" dan kegiatan media gathering menjadi penting untuk menguatkan kembali narasi pembangunan keluarga.

Ferry menilai perubahan strategi BKKBN melalui program Bangga Kencana yang menempatkan pembangunan keluarga sebagai prioritas utama merupakan langkah yang

tepat. Sebelumnya, fokus pembangunan keluarga berada di urutan setelah program kependudukan dan keluarga berencana. "Sekarang pembangunan keluarga ditempatkan di urutan pertama. Ini menunjukkan arah kebijakan yang ingin mengedepankan peran keluarga," ujarnya.

Meski demikian, Ferry menegaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara, pihaknya tetap mendukung dan menjalankan program pemerintah. Namun, ia menilai perlu adanya pengawasan agar implementasi program berjalan efektif dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan jangka panjang. Ia juga melihat program MBG sebagai peluang bagi BKKBN untuk mengambil peran strategis dalam memastikan integrasi antara kebijakan gizi dan pembangunan keluarga. "Ini kesempatan bagi BKKBN untuk terlibat mengawal program tersebut bersama pendekatan kependudukan dan pembangunan keluarga," katanya.

Ferry berharap konsep integrasi tersebut dapat didorong hingga ke tingkat perencanaan nasional, termasuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal tersebut agar pembangunan SDM dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan. (Mamay)

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Zulkarnaen Aritonang | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Perwakilan Riau:** Aspin Hutapea (Kepala) | **Biro Kampar:** David Hutasoit (Kepala) | **Biro Belitung/Belitung Timur:** Yustami Al (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Tanjab Barat:** Kesuma Indrawijaya (Kepala) | **Biro Musi Banyuasin:** Rama Putra (Kepala) | **Biro Muko Muko:** Japri (Kepala), Aldo Surya Elwasa Putra | **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Biro Lampung Timur:** Tengku AR | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala), Sahatar Simarmata (Wakil) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Perwakilan Jawa Tengah:** Nas Sibarani | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Perwakilan Jawa Timur:** Bjounet AS (Kepala) | **Biro Nganjuk:** Agastyan AS (Kepala) | **Biro Ponorogo:** Sugeng Santoso (Kepala) | **Biro Kediri:** Deni Agung Prasetyo (Kepala) | **Biro Blitar:** Arif Triono (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto:** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Kota Mojokerto /Jombang:** Totok Setyanto (Kepala) | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan:** Wiro Utomo (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala) | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala) | **PERCETAKAN:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika. (Isi diluar tanggungjawab percetakan). Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang. Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473

Pembinaan Tertib Administrasi PKK.....

gram pemberdayaan keluarga bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok I TP PKK Kabupaten Ny Lulinim Purba. Dirinya menegaskan pentingnya kesesuaian antara data

administrasi dengan realisasi kegiatan di lapangan. Setiap program harus tercatat lengkap, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti nyata pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Camat Bandar Masilam Ida Royani

Damanik, menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Nagori Bandar Tinggi sebagai lokasi percontohan. Ida memastikan dukungan penuh agar tertib administrasi ini dapat menjadi standar terbaik bagi nagori lainnya.

Kegiatan ini diharapkan

Halaman 7

mampu memotivasi seluruh kader untuk terus berinovasi dan menjaga kekompakan. Dengan administrasi yang tertib, Nagori Bandar Tinggi siap menjadi contoh dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang lebih baik.(RD)

Angin Hujan Disertai Petir

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kamis, 2/4/2026.

“La juga mengatakan,” terkait dengan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun ini kita tengah menyiapkan dokumen Resiko Penangu-

langan Bencana (RPB) saat ini kita meminta tenaga ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM),” kata Kabid Dody.

“Bukti kepedulian kita terhdap bencana kita juga menyiapkan dokumen untuk

disampaikan ke pusat guna mengusulkan kebutuhan yang kita butuhkan, selain menyiapkan dokumen RPB kita membuat Kajian Resiko Bencana (KRB).

Dikatakan nya juga,” kes-

Halaman 7

iapan semua dokumen sudah mencapai sembilan puluh persen sembari menunggu asistensi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” imbuh Kabid.

(JPR)

Semangat Gotong-Royong Sambut Lomba PKK

an Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata rapi.

“Gotong-royong ini tidak hanya untuk persiapan lomba, tetapi juga sebagai upaya

membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan,” ujarnya.

Antusiasme warga terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Mereka bekerja sama dengan penuh kekompakan, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi

ciri khas masyarakat.

Perangkat Kelurahan Suka Makmur turut mengapresiasi kehadiran Babinsa yang selalu aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Diharapkan, melalui kegiatan ini, Kelurahan Suka Makmur dapat tampil maksimal dalam perlombaan PKK sekaligus men-

Halaman 7

jadi contoh lingkungan yang bersih dan tertata.

Kegiatan gotong-royong berlangsung lancar, aman, dan penuh kekrabaran, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat dalam membangun wilayah yang lebih baik.

(Isnani)

Desakan Hak Angket DPRD Babel Muncul.....

Dalam surat itu, Hellyana mengungkap sejumlah kendala yang disebut menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai wakil kepala daerah. Ia menyebut saat ini tidak lagi didampingi ajudan maupun personel pengamanan (walpri) saat menjalankan kegiatan kedinasan.

Selain itu, operasional kantor Wakil Gubernur disebut hanya didukung dua tenaga P3K dengan kewenangan terbatas. Kondisi tersebut dinilai membuat fungsi administrasi dan koordinasi pemerintahan menjadi tidak maksimal.

Hellyana juga menyoroti fasilitas di rumah jabatan Wakil Gubernur yang disebut tidak lagi memadai untuk menunjang kegiatan kedinasan.

“Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas konstitusional Wakil Gubernur dalam membantu Gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah,” tulis Hellyana dalam surat tersebut.

Sebagai bentuk transparansi, surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Prabowo Subianto, Tito Karnavian, serta Puan Maharani.

Merespons polemik tersebut, kelompok Masyarakat Peduli Belitung (MPB) mengirimkan surat terbuka bernomor 01/MPB/III/2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (11/3/2026).

Ketua MPB, H. A. Hadi Adjin, bersama Sekretaris Sabriansyah mendesak DPRD Babel menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan yang dinilai sudah berlalu-larut.

“Selama setahun terakhir masyarakat merasa tidak nyaman dengan rentetan peristiwa antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Sudah saatnya DPRD bersikap dan melakukan penyelidikan agar persoalan ini tidak terus ber-

larut,” ujar Hadi.

Ia menilai konflik internal di level pimpinan daerah berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Negeri Serumpun Sebalai.

Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Babel, Suryadi Saman, juga menyoroti situasi tersebut. Ia menyayangkan adanya kebuntuan komunikasi di level pimpinan daerah.

Menurutnya, kondisi ketika seorang wakil gubernur harus mengirim surat resmi kepada gubernur untuk meminta dukungan fasilitas protokol merupakan hal yang tidak lazim dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini menunjukkan adanya komunikasi yang tersumbat. Sangat disayangkan jika tata kelola pemerintahan harus diwarnai perseteruan internal seperti ini,” ujarnya.

Suryadi berharap gubernur, DPRD, dan pejabat terkait dapat segera mengambil langkah untuk merespons as-

Halaman 7

pirasi masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang harmonis dan kondusif di Provinsi Babel.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu sikap dari pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Menteri Dalam Negeri, untuk merespons polemik tersebut.

Sabriansyah menilai konflik antara gubernur dan wakil gubernur berpotensi merugikan masyarakat, terutama ketika provinsi tersebut masih berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan dibandingkan daerah lain.

“Tidak elok jika di tengah upaya pembangunan, masyarakat justru disuguhi polemik yang menyerupai drama berkepanjangan,” katanya.

Sementara itu, pihak terkait masih dalam proses konfirmasi wartawan untuk mendapatkan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi.

(Yustami)

Pastikan Arus Balik Aman dan Lancar.....

Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., turun langsung meninjau aktivitas penumpang di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Jumat (27/03/26). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan lancar, khususnya bagi masyarakat yang kembali menuju Batam dan wilayah Kepulauan Riau.

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa keselamatan penumpang merupakan prioritas utama. Pemerintah daerah terus memastikan kesiapan armada, kelayakan layanan, serta penguatan sistem pengamanan di pelabuhan.

“Seluruh aktivitas arus ba-

lik terus kami pantau dan evaluasi. Alhamdulillah, sinergi antara KP3, TNI AL, Satpol PP, dan seluruh pihak terkait berjalan baik, sehingga situasi pelabuhan tetap kondusif serta bebas dari praktik percaloan tiket,” ujar Bupati.

Menanggapi keluhan penumpang terkait antrean tiket, Pemkab Tanjabbar langsung mengambil langkah cepat dengan menyediakan kursi antrean sebagai bentuk peningkatan pelayanan.

Selain itu, fasilitas khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, serta ibu menyusui juga telah disiapkan guna memastikan kenyamanan seluruh pengguna jasa.

Saat ini, Pelabuhan Roro

Kualatungkal dilayani oleh dua armada, yakni KMP Sembilang dan KMP Senengin. Pemerintah daerah juga telah menyurati pihak ASDP untuk menambah armada selama periode arus balik, mengingat jumlah penumpang yang mencapai sekitar 17 ribu orang per hari, jelas Bupati

“Kami mengingatkan para pengelola jasa angkutan agar selalu mengutamakan keselamatan penumpang, dermaga ini merupakan salah satu gerbang penting menuju Kualatungkal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait layanan

transportasi, yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Melalui peninjauan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan humanis bagi masyarakat, khususnya pada momentum arus balik Lebaran.

Turut mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jajaran TNI AL, Kapolsek KP3, pihak ASDP, serta Satpol PP.

(Tenk/ Kominfo- Tjb)

93 ASN Resmi Dilantik Bupati Sukabumi

ini kosong, yakni pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Momentum ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, Sekretaris Daerah H Ade Suryaman, Inspektur Kabupaten Sukabumi Komarudin, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Bupati H Asep Japar menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar proses administratif, tetapi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa sumpah

jabatan yang diucapkan para ASN bukan formalitas, melainkan komitmen moral untuk bekerja jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Bupati menekankan bahwa ASN merupakan unsur utama dalam memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Karena itu, setiap ASN harus mampu memberikan pelayanan cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil.

“ASN harus melayani masyarakat, bukan hanya bekerja secara administratif. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih cepat dan jelas,” tegasnya.

Bupati juga meminta

seluruh ASN aktif menjelaskan berbagai persoalan publik, termasuk yang berkembang di media sosial. Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah harus dijawab dengan penjelasan yang baik, bukan diabaikan apalagi dibalas dengan emosi.

“Jika ada kritik masyarakat di media sosial terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau pelayanan lainnya, ASN wajib hadir memberi penjelasan sesuai kapasitas dan tupoksi. Jawab dengan santun, terukur, dan informatif,” ujarnya.

H Asep Japar menambahkan bahwa menjaga nama

Halaman 7

baik Pemkab Sukabumi adalah tugas semua ASN. Karena itu, ia berpesan agar seluruh pegawai menjadi role model, menjaga integritas, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Berikut tiga pejabat setingkat eselon II B yang resmi dilantik untuk mengisi posisi strategis: Deni Yudono SKM MMKP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ganjar Anugrah SIP MSi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dadang Rustandi SH ST MA sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. (YUD)

81 Kepsek Baru di Garut Terima SK.....

juga P3K, proses rekrutmen kepala sekolah berbasis Aplikasi yang harus ditempuh oleh masing masing calon kepala sekolah dengan mengikut arahan untuk melengkapi berbagai persaratannya, hal tersebut dinas pendidikan kabupaten Garut juga dengan membentuk kepanitiaan guna meneliti serta memperivikasi dokumen (Berkas) secara manual agar tidak ada hambatan atau kekurangan administrasi yang disesuaikan dengan yang dipersaratkan oleh kementrian.

Dari proses yang begitu lumayan lama akhirnya BKD yang didampingi Sekretaris Dinas pendidikan kamis (02/04) menyerahkan Petikan keputusan bupati tentang Pe-

jabat Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar Negeri sebanyak 81 orang. Penyeahan dilaksanakan di Gedung PGRI jalan Pasundan, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang sedang di proses.

Sekdis Iwan Riswandi, S.IP mengatakan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah telah ditetapkan keputusan pak Bupati tentang pengangkatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 81 orang.yang su-

Halaman 7

dah berhasil melalui proses sementara sisanya terus berproses dengan target pada tahun ajaran baru setiap sekolah dikabupaten Garut terisi oleh kepala sekolah yang definitif.

Iwang juga mengatakan bahwa BKD akan mengundang seluruh kepala sekolah baru untuk menjalankan Diklat sebagai prasarat kepemimpinan dan akan mengundang lebih dari 400 orang kepala sekolah yang baru diangkat, sementara 21 orang yang baru saja diberikan SK harus segera bertugas sesuai tanggal yang tertera pada keputusan SK yaitu 1 April walaupun SK nya baru diserahkan pada tanggal 2 April, tegasnya.

(Hartono)

Pemko Siapkan Transformasi Kota

Selasa (31/3/2026). Momentum ini menjadi langkah penting dalam memastikan wajah kota semakin modern, tangguh, dan berdaya saing.

Musrenbang dihadiri jajaran Forkopimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga organisasi perangkat daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa pembangunan kota disusun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen strategis.

Wali Kota Hendri Arnis membuka kegiatan dengan nada penuh optimisme. Ia menegaskan bahwa tahun mendatang harus menjadi periode percepatan pembangunan yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hendri, Musrenbang bukan sekadar rutinitas, melainkan forum krusial yang menentukan arah kemajuan kota secara komprehensif.

“Pembangunan harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya integritas dalam perencanaan, terutama saat kota menghadapi tantangan pemulihan pascabencana yang membutuhkan penanganan terarah dan menyeluruh.

Pemerintah Kota memastikan berbagai program yang disusun memiliki kejelasan target serta berorientasi pada penguatan ketahanan kota, baik dari segi infrastruktur maupun sosial ekonomi.

Di bidang pendidikan, Hendri menggarisbawahi bahwa Padang Panjang memiliki identitas kuat sebagai kota pelajar. Oleh sebab itu, perluasan perguruan tinggi, peningkatan mutu sekolah, serta penguatan program Sekolah

Rakyat dan Sekolah Garuda menjadi prioritas.

Ia menyatakan bahwa kualitas pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif di masa depan.

Selain pendidikan, sektor pariwisata budaya juga mendapat perhatian besar. Pemko menargetkan revitalisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) agar menjadi destinasi modern yang representatif dan lebih mengundang wisatawan.

Revitalisasi ini diproyeksikan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai pusat budaya di Sumatera Barat.

Untuk mendukung sektor perdagangan dan aktivitas masyarakat, Pemko juga merencanakan pembangunan gedung parkir bertingkat di kawasan Pasar Pusat. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi kepadatan kendaraan dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Wali kota menegaskan bahwa peningkatan fasilitas pasar merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan pedagang dan pelaku UMKM.

Ia turut mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk menyampaikan masukan strategis yang bisa memperkaya perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Dina Febriyanti, mengapresiasi konsistensi Pemko dalam menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan adaptif.

Dina menyebut bahwa meskipun Padang Panjang memiliki wilayah kecil, kontribusinya terhadap ekonomi provinsi sangat signifikan,

terutama dalam sektor perdagangan eceran yang terus bertumbuh positif.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota agar pembangunan bisa berjalan optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Bappeda, Sri Endang Mulyati, memaparkan rangkaian proses Musrenbang yang telah melibatkan masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kota.

Ia menjelaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat dikompilasi secara sistematis untuk memastikan prioritas pembangunan benar-benar mewakili kebutuhan riil.

Sri Endang menegaskan bahwa RKPDP berperan penting sebagai dasar penyusunan anggaran dan evaluasi pembangunan, sehingga dokumen ini harus disusun dengan ketelitian tinggi.

Ia juga menyampaikan bahwa fokus pembangunan mendatang diarahkan pada peningkatan layanan publik, percepatan pemulihan ekonomi, serta penguatan ketahanan kota.

Musrenbang kali ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang lebih modern, aman, nyaman, dan memiliki daya tarik ekonomi yang kuat.

Dengan semangat kolaborasi yang dihadirkan seluruh pemangku kepentingan, Pemko optimistis pembangunan kota akan semakin progresif di berbagai sektor.

Akhirnya, Musrenbang bukan hanya menjadi forum penyusunan program, tetapi juga simbol komitmen Pemko dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (Zak)

Ketua DPRD Langkat Hadiri Bukber KNPI

sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Dalam sambutannya, Sribana Perangin Angin menyampaikan ucapan selamat kepada M. A. Bahrum, ST, yang terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Langkat periode 2026-2029.

Ini adalah amanah besar untuk menyatukan pemuda dan membawa organisasi ini lebih maju. Perbedaan adalah hal biasa, namun dapat diselesaikan melalui dialog dan kebersamaan, jadikan KNPI sebagai wadah pemersatu pemuda di daerah, ujarnya.

Melalui kegiatan ini, kami

Sribana juga menyatakan keterbukaannya terhadap kritik sebagai bagian dari upaya membangun daerah yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua terpilih KNPI Langkat, M. A. Bahrum, ST, mengatakan bahwa struktur kepengurusan saat ini masih dalam proses penyusunan. Bahrum berharap momentum silaturahmi dan buka bersama tersebut menjadi langkah awal dalam merajut kembali persatuan pemuda pasca Musyawarah Daerah (Musda).

Melalui kegiatan ini, kami

Halaman 7

ingin merangkul semua pihak agar kembali bersatu. KNPI harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pemuda di Langkat, tegas Bahrum.

Bahrum juga menegaskan komitmennya untuk membangun KNPI yang aktif dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan generasi muda. Kegiatan silaturahmi dan buka bersama sebagai simbol harapan agar KNPI Langkat semakin solid dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. (AN)

Mudik, Terjadi Lonjakan Penumpang.....

di tanggal 22 Maret kemarin masih jadi puncak arus balik dengan 1480 penumpang,” ujar Kuwardoyo.

Menariknya, angka kedatangan penumpang di Stasiun Kota Banjar tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan angka keberangkatan. Secara kumulatif sejak 11 Maret hingga hari ini, sebanyak 15.552 penumpang telah tiba di Kota Banjar.

Lonjakan penumpang yang datang terpantau paling tinggi pada Kamis, (19/3), dengan total 1.570 orang. Tingginya angka kedatangan ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang memilih moda transportasi kereta api

untuk menuju wilayah Banjar dan sekitarnya.

Pihak Daop 2 Bandung terus memantau perkembangan arus penumpang guna memastikan pelayanan di Stasiun Banjar tetap prima, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi kereta api.

Salah seorang penumpang, Anisa (26), mengaku hendak kembali bersama keluarganya ke Jakarta setelah menikmati suasana libur lebaran karena sudah mulai masuk kerja.

Menurutnya, mudik menggunakan layanan kereta api menjadi pilihan utama karena lebih nyaman, tidak terje-

bak kemacetan dan bisa tepat waktu. “Habis mudik sama keluarga mau balik ke Jakarta. Persiapan sudah mulai masuk kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pengawas Terminal Tipe A Banjar Jenny Mariya Wirandani mengatakan, saat ini sudah arus balik pemudik di Terminal Banjar.

Ia memprediksi puncak arus balik pemudik di Terminal akan terjadi pada hari ini dan masih akan berlangsung hingga malam hari. “Puncak arus balik kemungkinan hari ini sampai nanti malam soalnya besok sudah mulai hari kerja,” singkatnya. (Mamay)

Mayjen (Purn) Ramses Limbong Dikukuhkan sebagai Ketua Umum Limbong Mulana Sejabodetabek Banten 2026-2030

Jakarta, Jaya Pos

Suasana penuh sukacita dan nuansa kekeluargaan menyelimuti pengukuhan Mayjen (Purn) Ramses Limbong sebagai Ketua Umum Limbong Mulana, Boru & Bere (PULIMBOR) Sejabodetabek Banten periode 2026-2030. Proresi sakral tersebut digelar dalam rangkaian Pesta Bona Taon Limbong Mulana, Minggu (29/3/2026), di Sopo Marpingkir, Jakarta Timur.

Ramses Limbong sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Besar (Mubes) yang berlangsung pada 29-30 November 2025 di Kinasih Resort & Conference, Caringin, Bogor. Ia menggantikan Berman Limbong, SH, MH, yang telah memimpin organisasi marga tersebut selama dua periode atau delapan tahun terakhir.

Rangkaian acara diawali dengan kebaktian yang dipimpin Pdt. Freddy Limbong. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 133:1 menekankan pentingnya hidup rukun dan harmonis dalam persaudaraan. Dalam khotbahnya, Pdt. Freddy mengingatkan keluarga besar Limbong Mulana agar tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain dan tidak iri terhadap keberhasilan sesama.

"Berusahalah selalu mendandankan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan," pesannya di hadapan ribuan jemaat yang hadir dengan



Ketua Dewan Penasehat, Berman Limbong, SH, MH Mengukuhkan Mayjen (Purn) Ramses Limbong Menjadi Ketua Umum Limbong Sejabodetabek Banten Periode 2026-2030.

khidmat.

Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Penasehat yang juga mantan Ketua Umum, Berman Limbong. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur karena proses pergantian kepemimpinan kali ini berlangsung damai, elegan, dan penuh persatuan.

"Di penghujung delapan tahun kepemimpinan saya, momen ini menjadi catatan sejarah bagi Limbong Mulana Sejabodetabek Banten. Kita memberi contoh kepada generasi penerus bahwa

pergantian pemimpin dapat berjalan dengan sukacita dan kebersamaan," ujarnya.

Berman juga kembali mengingatkan motto kepemimpinannya, "Bersinarlah Terus Sampai Akhir," sebagai pesan agar setiap pemimpin dan anggota pungan tetap menjadi terang serta membawa manfaat bagi sesama.

Sebagai bentuk penghargaan, Ramses Limbong menyerahkan plakat dan kenang-kenangan kepada Berman Limbong, termasuk dokumentasi perjalanan organisasi selama delapan tahun terakhir. Momen terse-

but berlangsung haru dan disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.

Dalam pidato perdananya, Ramses Limbong menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas organisasi dengan menitikberatkan pembinaan generasi muda.

"Membangun marga harus dimulai dari generasi muda agar tetap bangga sebagai suku Batak, khususnya Marga Limbong. Kita harus mampu berkembang di era modern tanpa kehilangan jati diri," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh



3 Pendeta Marga Limbong Ikut Mendoakan Ketua Terpilih.

anggota untuk memegang teguh falsafah Dalihan Na Tolu sebagai landasan kehidupan sosial, sehingga PULIMBOR Sejabodetabek Banten tetap kompak, solid, dan dihormati di tengah masyarakat.

Diperkirakan lebih dari 2.500 orang menghadiri Pesta Bona Taon tersebut. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi akbar, mengingat anggota tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek dan Banten dengan kesibukan masing-masing.

Acara semakin semarak dengan penampilan tortor dari paropmuan Limbong Mulana serta koor gabungan dari seluruh wilayah. Lagu "Nang Gumalunsang Angka Laut" yang dinyanyikan bersama mengemuka memenuhi gedung, menghadirkan suasana haru dan kebanggaan akan identitas budaya Batak.

Seluruh turpuk turut menampilkan tortor sembari menyerahkan santi-santi sebagai bentuk dukungan kepada panitia dan kepengurusan baru. Anak-anak dan remaja pun ambil bagian menampilkan tortor dengan penuh semangat, menjadi simbol estafet budaya yang terus dijaga lintas generasi.

Ketua Panitia Bona Taon, Chayono Limbong, menyampaikan apresiasi atas partisipasi luar biasa keluarga besar Limbong Mulana.

"Antusiasme ini mem-

buktikan bahwa semangat persaudaraan kita tetap nyata," ujarnya.

Panitia juga menyiapkan berbagai door prize, antara lain dua unit sepeda motor, enam unit sepeda motor listrik, dua unit televisi 50 inci,

memberikan dukungan moral maupun materiil. Ia turut memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara.

Pesta Bona Taon 2026 bukan sekadar perayaan ta-



Limbong Sihole saat memberikan santi santinya.

serta beragam hadiah hiburan lainnya. Saat pengundian hadiah utama, suasana gedung mendadak hening penuh harap. Dua pemenang sepeda motor tampak haru ketika nomor undian mereka diumumkan.

Berdasarkan laporan bendahara, dana yang terkumpul selama acara mencapai Rp193 juta, belum termasuk dana yang dihimpun sebelumnya. Dana tersebut akan menjadi modal awal bagi kepengurusan baru dalam menjalankan program sosial dan kegiatan adat ke depan.

Chayono juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur, turpuk, dan perorangan yang telah

hunan, melainkan simbol persatuan, kesinambungan kepemimpinan, dan komitmen menjaga nilai-nilai luhur budaya Batak di perantaraan.

Dengan kepemimpinan Mayjen (Purn) Ramses Limbong, keluarga besar Limbong Mulana Sejabodetabek Banten kini menatap masa depan dengan optimisme baru—tetap berakar pada adat, kokoh dalam persaudaraan, dan siap bersinar di tengah masyarakat luas.

Acara ditutup dengan doa bersama dan seluruh hadirin menyanyikan lagu "Oh Tano Batak," mengingatkan akan tanah leluhur yang selalu dirindukan. ***



Setelah dikukuhkan Foto Bersama Ketua Terpilih dan Ketua sebelumnya.



Limbong Mulana Bandung dan Sukacita ikut memberikan dukungan dengan memberikan santi santi



Koor Paropmuan Limbong Mulana Sejabodetabek Banten.



Tortor Kreasi Paropmuan Limbong Mulana Sejabodetabek Banten.



Para Remaja ikut manortor bersama sama.



Anak anak juga ikut manortor sambil menerima saweran dari orang tua.



Door prize 2 unit motor, 6 unit motor listrik, 2 TV 50 in dan yang lainnya.